

EDISI KHUSUS

CAKRAWALA

K E B A N G S A A N

81 Tahun Kemerdekaan Indonesia

✓ Karakter Menentukan Nasib Bangsa | Albertus M. Patty

Merawat Kemerdekaan, Melawan Kejadongan ✓
Okky Madasari

✓ Kebijakan Publik dan Jalan Panjang Manusia Indonesia Merdeka | Riski

Ideologi dan Kepemimpinan dalam Revolusi Kemerdekaan ✓
Manuel Kaisiepo | Indonesia

✓ Proklamasi Belum Usai: Saatnya Generasi Muda Memimpin Transformasi Indonesia | Junaidi

Merdeka yang Sejati: Menemukan Jiwa Nusantara di Tengah Badai ✓
Sudarsono Soedomo | Zaman

Manusia Indonesia Merdeka: Membebaskan Manusia dari Reduksi Fungsi Menuju Aktualisasi Diri ✓
Izza Madani | Diri

Merdeka Menuju
Indonesia Emas
2045

Curahan Hati

PONTJO SUTOWO

APA SALAH SAYA DAN
HOTEL SULTAN?

Daftar Isi:

Salam Kebangsaan

- 1 **Merdeka Menuju Indonesia Emas 2045**
Ansel Da Lopes
- 4 **Sumber Daya Alam Indonesia, Berkah atau Kutukan?**
Pontjo Sutowo

Artikel

- 7 **Merawat Kemerdekaan, Melawan Kejadongan**
Okky Madasari
- 10 **Ideologi dan Kepemimpinan dalam Revolusi Kemerdekaan Indonesia**
Manuel Kaisiepo
- 14 **Mewaspadai Situasi yang Abnormal**
Ahmad Zaky Siradj
- 17 **Merdeka yang Sejati: Menemukan Jiwa Nusantara di Tengah Badai Zaman**
Sudarsono Soedomo
- 19 **Segi Tiga Besi KKN dalam Tata Kelola Sistem Politik**
Prasetijono Widjojo MJ
- 21 **Apa Salah Saya dan Hotel Sultan?**
Pontjo Sutowo
- 24 **Menemukan dan Mengartikulasikan Indonesia Dari “Apa itu” menuju “Bagaimana Menjadi”**
Susetya Herawati
- 26 **Podcast Saatnya Cendekiawan Bicara Ruang Dialog Kebangsaan yang Menjangkau Generasi Digital**
- 28 **Kebijakan Publik dan Jalan Panjang Manusia Indonesia Merdeka**
Riski

- 31 **Potensi dan Prospek Cerah Aneka Pangan Lokal Andalan yang Digemari di Pasar Global dan Bernilai Tambah Tinggi**
Retno Sri Endah Lestari
- 34 **Manusia Indonesia Merdeka: Membebaskan Manusia dari Reduksi Fungsi Menuju Aktualisasi Diri**
Izza Madani
- 36 **Karakter Menentukan Nasib Bangsa**
Albertus M. Patty
- 39 **Proklamasi Belum Usai: Saatnya Generasi Muda Memimpin Transformasi Indonesia**
Junaidi

Rubrik Khusus Yudi Latif

- 41 **Prabowo: Ambisi Besar dalam Defisit Kapabilitas**
- 44 **Menyiapkan Sekoci bagi Penumpang Kapal Retak**
- 46 **Indonesia Tak Akan Selamat?**



Tim Redaksi

PENERBIT

Aliansi Kebangsaan

PEMIMPIN UMUM

Pontjo Sutowo

WAKIL PEMIMPIN UMUM

Ahmad Zacky Siradj

PEMIMPIN REDAKSI

Ansel Da Lopez

SEKRETARIS REDAKSI

Nofia Fitri

DEWAN REDAKSI

I Dewa Putu Rai
Prasetijono Widjojo MJ
Manuel Kaisiepo
Wisnubroto Baron

REDAKTUR PELAKSANA

Nofia Fitri
Yuli Astuti Tyas
Irma Khairani

SEKRETARIAT

Nova Fitri
Indri Ayu



Salam Kebangsaan

Oleh Redaksi

Cakrawala Kebangsaan

Merdeka Menuju Indonesia Emas 2045

Selamat memperingati Proklamasi Kemerdekaan RI ke-81 pada 17 Agustus 2026 yang baru lalu. Setelah bergumul dengan berbagai persoalan bangsa selama 81 tahun, sembilan belas tahun lagi bangsa dan negara ini akan memperingati satu abad merdeka pada 2045, tahun yang dicita-citakan meraih Indonesia Emas, sebuah cita-cita Proklamasi yang sangat mulia dan luhur: mencapai Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Apakah cita-cita itu akan tercapai, tergantung bagaimana kita mengelola perjalanan hidup bangsa dan negara ini ke depan. Apalagi Indonesia sekarang boleh dikatakan sedang tidak baik baik-saja.

Di tengah kegembiraan memperingati Proklamasi Kemerdekaan ke-81 dan cita-cita meraih Indonesia Emas 2045, terbesit pertanyaan, mengapa setelah 81 tahun merdeka, kita masih bergumul dengan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya penegakan hukum, dan semakin lebarnya kesenjangan ekonomi. Mengapa pembangunan terus berlangsung, tetapi kepercayaan publik terasa semakin rapuh? Lalu, untuk siapa sebenarnya kemerdekaan ini?

Sebagai bangsa kita tidak boleh berputus asa. Kita harus terus berjuang. Tidak ada bangsa yang lahir dalam keadaan selesai. Setiap bangsa dibentuk oleh pergulatan, oleh kegagalan, dan itu juga yang dialami Indonesia saat ini. Yang terpenting ada kesadaran dan semangat untuk bangkit kembali. Perjuangan melawan kolonialisme merebut kemerdekaan adalah perjuangan maha berat. Tetapi, perjuangan memimpin bangsa dan negara pasca kemerdekaan, sesungguhnya jauh lebih berat.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945 hingga saat ini, Banyak kemajuan yang telah kita capai. Infrastruktur berkembang, teknologi digital mengubah kehidupan, kesempatan pendidikan semakin terbuka. Namun, bagaimana di bidang lainnya:



politik, ekonomi, hukum, konstitusi, dan masih banyak lagi. Lebih-lebih belakangan ini, tindakan korupsi semakin merajalela dan memuakkan.

Sekali lagi, Indonesia sekarang sedang tidak baik-baik saja. Namun, hendaknya disadari, sebagai sebuah negara dan bangsa, Indonesia tidak saja hidup untuk hari ini, tahun ini atau tahun depan, tetapi untuk selamanya. Pembangunan adalah pekerjaan lintas generasi. Indonesia bukanlah milik satu pemerintahan, satu kelompok, atau satu zaman. Ia adalah ikhtiar panjang yang diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya.

Dalam kehidupan demokrasi, pergantian pemerintahan semestinya menghadirkan kesinambungan yang diperbaiki, bukan kesinambungan yang diputus. Jalan menuju kemajuan bukanlah jalan yang bebas dari kesalahan, tapi perjalanan panjang yang menuntut keberanian untuk berubah, kerendahan hati untuk belajar, kebijaksanaan untuk mempertahankan yang baik dari masa lalu, serta kesungguhan menjaga keseimbangan antara kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan. Untuk semuanya itu, diperlukan sikap masyarakat yang cerdas dan kritis.

Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, barulah membebaskan Indonesia dari kolonialisme, belum memerdekakan manusia Indonesia sebagai anak bangsa. Sejauh mana setiap warga mampu hidup bermartabat, berpikir bebas, memperoleh kesempatan yang adil, dan mengembangkan seluruh potensinya. Manusia Indonesia hendaknya tidak sekedar menjadi objek pembangunan, tetapi harus menjadi subjek pembangunan.

Negara Kaya, Rakyat Tersisih

Di antara berbagai persoalan yang dihadapi saat ini demi kemakmuran rakyat adalah bagaimana mengelola sumber daya alam (SDA) yang dimiliki. Sebagai sebuah negara tropis, Indonesia adalah negara yang sangat kaya raya. Sumber daya alamnya berlimpah, baik di darat maupun di laut. Belum terhitung di udara, yang hingga sekarang masih terabaikan. Kita memiliki berbagai jenis tambang dan hutan yang luas dengan berbagai jenis kayu yang sangat menjanjikan. Kekayaan kita di laut juga berlimpah dengan berbagai jenis ikan dan hasil laut lainnya. Namun, semuanya harus dikelola secara baik, jika kita ingin mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan, "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Pasal ini memberikan jaminan kepada rakyat Indonesia bahwa kekayaan alam yang terkandung di negeri ini akan bermanfaat jika digunakan untuk kesejahteraan mereka. Namun, dalam praktek bernegara kita, lebih-lebih dewasa ini, rakyat, terutama di daerah yang memiliki kekayaan alam itu tersisih dan tertinggal. Hanya bisa menyaksikan kekayaan alam itu dikuasai dan dimanfaatkan oleh segelintir orang dan penguasa. Hendaknya disadari bahwa pembangunan sejati bukan hanya membesarkan kue ekonomi, melainkan juga memastikan setiap warga memperoleh bagian yang bermartabat.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 16 Juli 2026 hendaknya mengingatkan kita semua sebagai bangsa bahwa pengelolaan kekayaan alam Indonesia tidak boleh menyimpang dari amanat konstitusi. Mineral dan batubara (minerba) bukan hanya komoditas ekonomi, melainkan sumber daya strategis yang dikuasai oleh negara, dan diperjuangkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Antara lain soal pemberian hak prioritas atas izin wilayah usaha pertambangan (WIUP) minerba untuk kepentingan hilirisasi. WIUP hendaknya tidak dapat dilakukan melalui mekanisme penunjukkan langsung tanpa ukuran yang jelas. Prioritas harus benar-benar diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah, memperkuat rantai pasok industri nasional, dan melayani kepentingan bangsa. Di luar tujuan itu, pemberian hak secara langsung berpotensi bertentangan dengan konstitusi.





Harus Cerdas dan Kritis

Indonesia harus menjadi negara besar, kuat dan merata di bidang ekonomi. Hukum dan politik juga harus stabil, demikian juga di bidang pertahanan dan keamanan: harus menjadi negara yang kuat, aman dan bersih. Pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya hendaknya merata di seluruh tanah air; stabilnya ketahanan pangan, energi, air, serta pertahanan dan politik. Hukum harus adil dan tidak tebang pilih, serta pemerintahan harus bersih dan bebas dari semangat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sebagai negara yang menganut politik luar negeri bebas dan aktif, Indonesia perlu terus mengikuti berbagai perkembangan yang terjadi di dunia. Namun, semangat globalisasi tersebut hendaknya tidak mengurangi peran negara dalam proses pembangunan nasional. Negara harus tetap aktif, tetapi mengubah cara negara menjalankan pembangunan ekonomi. Globalisasi hendaknya tidak menjadi proses yang mempersempit ruang gerak negara.

Hendaknya kita semua menyadari bahwa kondisi politik dan ekonomi Indonesia saat ini semakin menunjukkan adanya kendali tersembunyi di balik institusi formal negara.

Perampasan kebijakan negara oleh segelintir elite dan oligarki, menjadi bagian dari berbagai masalah struktural yang sulit diperbaiki.

Dalam situasi ini, kekuasaan tidak lagi berada di tangan lembaga resmi yang bertanggungjawab kepada rakyat, melainkan dikendalikan oleh kekuatan bayangan, yang bekerja demi kepentingan pribadi dan kelompok.

Sekali lagi, sebagai anak bangsa Indonesia yang merdeka, masyarakat harus cerdas dan kritis terhadap semua kebijakan yang dinilai merugikan. Kemerdekaan sejati adalah kemampuan untuk berpikir kritis, mandiri dalam bersikap, dan bertanggungjawab atas tindakannya. Yakinlah, ini negara demokrasi, penguasa pasti tidak akan menghalangi dan merasa paling benar. Sebaliknya, akan menerimanya dengan lapang dada jika kita ingin mencapai Indonesia Emas 2045. Perjuangan kemerdekaan belum selesai, Kita membutuhkan generasi yang tidak hanya mewarisi kemerdekaan, tetapi juga menjaga jiwa kemerdekaan itu. ***



Sumber Daya Alam Indonesia, Berkah atau Kutukan?

Oleh Pontjo Sutowo

Ketua Aliansi Kebangsaan



Perbaikan atau penguatan tata kelola sumber daya alam merupakan keniscayaan bagi Indonesia untuk menjadikan kekayaan sumber daya alam kita sebagai berkah bukan kutukan, demi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(Diedit dari Sambutan FGD "Sumber Daya Alam Indonesia, "Berkah atau Kutukan" Kamis, 7 Agustus 2026)



Sebagai bangsa, kita baru saja memperingati HUT Kemerdekaan Indonesia ke-81, sebuah perjuangan panjang pembebasan bangsa Indonesia dari penjajahan. Kemerdekaan politik memang sudah kita peroleh. dan penjajahan fisik memang telah berakhir melalui proklamasi 17 Agustus 1945. Tetapi, kemerdekaan batin, cara berpikir, cara bersikap dan cara bertindak belum sepenuhnya hidup dalam diri bangsa Indonesia. Proklamasi memutus rantai kekuasaan, tetapi tidak otomatis memutus rantai mental.

Oleh karena itu, perjuangan pembebasan dari penjajahan ini harus terus kita lanjutkan, termasuk dalam mengelola sumber daya alam Indonesia demi kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia

seutuhnya. Indonesia kaya dengan sumber daya alam yang terbarukan (renewable) maupun yang tak terbarukan (non renewable), hayati (biotik) maupun non-hayati (abiotik), sehingga di masa lalu Indonesia sempat dijajah ratusan tahun lamanya karena tidak mampu mengelola sendiri sumber daya alamnya.

Namun, di balik limpahan anugerah tersebut, muncul pertanyaan mendasar, mengapa dengan kekayaan alam tersebut Indonesia belum mampu memakmurkan rakyatnya? Mengapa kemiskinan dan ketimpangan masih begitu nyata, bahkan di daerah yang kaya sumber daya alam? Mengapa di era Soeharto kontribusi minyak dan gas bumi terhadap APBN bisa mencapai sekitar 81%,

sementara kontribusi migas dalam APBN 2025 hanya sekitar 15%? Dilema ini membawa kita pada satu pertanyaan besar: "Apakah kekayaan alam Indonesia benar-benar berkah atau justru kutukan?".

Pisau Bermata Dua

Kekayaan alam tidak pernah dengan sendirinya melahirkan kemakmuran. Ia menuntut tata kelola yang bijaksana, adil, dan berorientasi pada kemakmuran rakyat, visi kedaulatan yang tegas, dan keberanian politik. Sumber daya alam yang dimiliki suatu negara bagai pisau bermata dua. Di satu sisi ia akan mendatangkan banyak manfaat bagi rakyat jika dikelola dengan tepat. Di sisi lain, sumber daya alam justru akan merugikan negara dan menyengsarakan rakyatnya jika berada di tangan yang tidak tepat dan salah urus. Sehingga muncul tesis "the resource curse" atau kutukan sumber daya alam terkait peran negara dalam mengelola sumber daya alamnya.

Tesis kutukan sumber daya alam yang pertama kali dikemukakan oleh Richard Auty dalam "Sustaining Development in Mineral Economies: The Resource Curse Thesis (1993)" menjelaskan, bagaimana negara-negara dengan sumber daya alam yang berlimpah tidak mampu memanfaatkan kekayaannya tersebut untuk mendorong ekonomi mereka. Dalam teorinya, negara-negara dengan kekayaan alam memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara tanpa sumber daya alam melimpah.

Lantas, bagaimana dengan Indonesia yang memiliki sumber daya alam berlimpah, ternyata belum mampu menjadikannya sebagai keunggulan kompetitif dan mewujudkan kesejahteraan yang kita cita-citakan. Indonesia masih terjebak dalam perekonomian warisan kolonialisme dengan ketergantungan pada eksploitasi sumber daya alam (ekstraktif), dan minimnya industrialisasi bernilai tambah tinggi. Tidak heran kalau kemudian Gustav Papanek (2014) menyebut Indonesia mengalami "penyakit Belanda (Dutch Disease)", yaitu penyakit terlena dengan kekayaan sumber daya alamnya. Jangan-jangan Indonesia juga mengalami paradoks "kutukan sumber daya alam (resources curse) tesis-nya Richard Auty (1993), yang dikuatkan oleh Sachs dan Warner (1995). Banyak Negara yang mampu mengelak dari kutukan ini.

Tidak Boleh Terlena

Tentu bangsa ini tidak boleh terus menerus terlena dengan kekayaan sumber daya alamnya. Bangsa ini harus mampu mematahkan tesis kutukan sumber daya alam. Dan, tentu bangsa ini juga tidak ingin dijajah kembali, walaupun mungkin dalam wujud atau bentuk baru, karena ketidakmampuan mengelola kekayaan sumber daya alamnya.

Kalau kita cermati dari berbagai sumber, kekayaan sumber daya alam Indonesia selama ini lebih diabdikan pada pengejaran target pertumbuhan ekonomi (economic growth), demi peningkatan pendapatan dan devisa negara (state revenue), sehingga pemanfaatan sumber daya alam dilakukan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip kedaulatan, kesejahteraan, keadilan, demokratis, dan keberlanjutan fungsi sumberdaya alam. Pemanfaatan sumber daya alam yang semata-mata mementingkan target peningkatan pendapatan dan devisa negara, juga menimbulkan implikasi sosial dan budaya yang cukup memprihatinkan.

Akibatnya, timbul berbagai macam persoalan terkait dengan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia yang cukup beragam. Ada persoalan penguasaan sumberdaya alam oleh kelompok kecil masyarakat, persoalan bagi hasil pusat-daerah, ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam, kerusakan lingkungan, ada persoalan korupsi, pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat/lokal, bahkan dalam aspek tertentu ada persoalan ketidak berdaulatan kita dalam mengelola sumber daya alam kita sendiri.



Dalam hal kedaulatan pengelolaan sumber daya alam, ternyata dalam sektor-sektor tertentu kita memang kehilangan kedaulatan atas kekayaan alam yang kita miliki. Aset-aset negara dan sumber daya alam Indonesia telah banyak dikuasai asing. Berdasarkan data dari Walhi, saat ini penguasaan minyak bumi Indonesia hampir 90% dikuasai asing. Realita ini sangat kontras dengan isi pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi, "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat".

Kalau kita cermati ketentuan Pasal 33 UUD 1945 tersebut, terdapat unsur penting dalam pengusahaan bumi, air, dan kekayaan alam Indonesia, yaitu unsur: "dikuasai negara" dan "sebesar-besar kemakmuran rakyat". Dua unsur besar tersebut merupakan hal yang sangat fundamental dalam konstitusi terkait dengan bagaimana pengelolaan sumber daya alam dilaksanakan.

Sumber daya alam yang ada di Indonesia, merupakan kekayaan bersama (common property) antara rakyat dan negara, melalui pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Garret Hardin dalam karya tulisnya, *The Tragedy of The Common*, melihat bahwa alasan-alasan ekonomi seringkali menggerakkan perilaku manusia secara perorangan maupun dalam kelompok, untuk memanfaatkan sumber daya alam secara bebas, padahal sumber daya alam adalah kekayaan bersama. Adanya kebebasan untuk mengeksploitasi sumber daya alam akan membawa kehancuran bagi masyarakat. Keadaan inilah yang oleh Hardin disebut dengan *tragedy of the common*.

Tata kelola sumber daya alam juga tidak terlepas dari praktek-praktek koruptif, seperti *under invoicing*, *transfer pricing* dengan nilai kebocoran mencapai US\$908 miliar, atau setara dengan sekitar Rp15.000 hingga Rp16.000 triliun yang terakumulasi selama sekian puluh tahun. Yang lebih berbahaya adalah praktek *state capture corruption*, bentuk korupsi yang melibatkan aktor-aktor elit, baik dari pemerintahan maupun sektor swasta dalam mengendalikan kebijakan dan institusi negara, demi keuntungan pribadi atau kelompok. Menurut Hariadi Kartodihardjo, peneliti tata kelola IPB University, *state capture corruption* sudah dimulai sejak 1977, yakni ketika Indonesia mulai memanfaatkan sumber daya alam untuk menumbuhkan ekonomi.

Salah satu modus utama *state capture corruption* adalah pembajakan regulasi, di mana kelompok tertentu mempengaruhi pembuatan undang-undang, regulasi, atau kebijakan untuk menguntungkan bisnis mereka. Ini bisa terjadi melalui lobi politik, pendanaan kampanye, atau bahkan penempatan orang-orang mereka di dalam lembaga legislatif dan eksekutif. Contohnya adalah ketika regulasi di sektor pertambangan, perkebunan, atau energi, dibuat sedemikian rupa sehingga menguntungkan segelintir korporasi, sementara masyarakat adat dan lingkungan menjadi korbannya.

Korupsi di sektor sumber daya alam juga memunculkan penguasaan oligarki terhadap kekayaan alam. Akibatnya, kekayaan sumber daya alam didominasi penguasaannya oleh orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Ketimpangan penguasaan sumber daya alam luar biasa besarnya. Hasil penelitian Walhi bersama Auriga pada Agustus 2022 menunjukkan, penguasaan lahan dan sumber daya alam untuk tambang, sawit, dan hutan oleh korporasi di Indonesia mencapai 94,8 persen atau sekitar 53 juta hektar. Sementara rakyat hanya menguasai sekitar 2,7 hektar saja.

Penguasaan oleh korporasi terhadap kekayaan alam menyebabkan eksploitasi besar-besaran yang intensif, terutama di sektor pertambangan, kehutanan, perikanan, dan perkebunan. Eksploitasi secara berlebihan, selain menyebabkan kerusakan lingkungan, juga membawa dampak sosial dan ekonomi. Eksploitasi sering kali tidak seimbang dengan manfaat bagi masyarakat lokal. Banyak komunitas adat kehilangan akses ke lahan mereka, sementara keuntungan besar mengalir ke perusahaan multinasional atau elit tertentu.

Tentu masih banyak persoalan lain dalam pengelolaan sumber daya alam kita yang belum saya sempat sebutkan dalam kesempatan ini. Banyaknya persoalan yang masih kita hadapi dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, tentu harus menjadi perhatian kita bersama, agar kekayaan alam kita tidak menjadi kutukan, tetapi berkah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. ***

Merawat Kemerdekaan, Melawan Kejadongan

Oleh **Okky Madasari**
Sastrawan dan Sosiolog



“Apa arti kemerdekaan jika republik ini terus dipimpin oleh kejadongan?”

Selama ini kita terbiasa menganggap ancaman terhadap kemerdekaan selalu datang dari luar. Karena itu, hingga Indonesia memasuki usia ke-81, istilah seperti antek asing atau londo ireng masih terus dipakai untuk menyimbolkan ancaman bagi sebuah bangsa. Seolah-olah kehancuran negara selalu bermula dari musuh yang datang menyeberangi perbatasan.

Padahal sejarah memperlihatkan sangat sedikit peradaban besar yang benar-benar runtuh semata-mata karena serangan dari luar. Kebanyakan justru mengalami pembusukan dari dalam sebelum akhirnya roboh. Kekuasaan menjadi korup, elite kehilangan integritas, birokrasi berubah menjadi alat melayani kepentingan sendiri, sementara kemampuan negara membaca kenyataan semakin melemah. Ketika fondasi moral dan intelektual penguasanya lapuk, musuh dari luar sering kali hanya menjadi pukulan terakhir bagi bangunan yang sesungguhnya sudah retak sejak lama.

Dalam sosiologi historis, keruntuhan negara dan imperium tidak dipahami sebagai entitas yang runtuh secara tiba-tiba. Keruntuhan hampir selalu merupakan proses panjang ketika elite politik semakin terpisah dari rakyat, kekuasaan lebih sibuk mempertahankan dirinya daripada memperbaiki keadaan, dan kritik dipandang sebagai ancaman, bukan sebagai mekanisme koreksi. Pada tahap itulah sebuah negara kehilangan daya hidupnya. Ia mungkin masih memiliki wilayah, pemerintahan, bahkan tentara yang kuat, tetapi perlahan kehilangan kemampuan untuk memperbarui dirinya.

Karena itu, ancaman terbesar terhadap sebuah republik tidak selalu datang dari luar. Ia justru lahir ketika watak penguasanya berubah. Ketika jabatan tidak lagi dipahami sebagai amanah, melainkan sebagai hak istimewa. Ketika ilmu pengetahuan disingkirkan oleh kesetiaan politik. Ketika kesombongan membuat kekuasaan merasa tidak lagi perlu mendengar rakyat.

Kejadongan Kekuasaan

Sosiolog Syed Hussein Alatas memberi nama yang sederhana namun sangat tajam bagi watak semacam itu: Jadong. Singkatan dari jahat, bodoh, dan sombong. Tiga sifat yang tampak sebagai kelemahan pribadi, tetapi ketika menguasai elite politik akan menjelma menjadi cara sebuah negara dijalankan.

Jahat karena menjadikan negara sebagai alat melayani kepentingan diri dan kelompok. Bodoh karena menolak pengetahuan, memusuhi kritik, dan menganggap loyalitas lebih penting daripada kompetensi. Sombong karena merasa rakyat harus tunduk, sementara kekuasaan tidak perlu mempertanggungjawabkan dirinya.

Ketiga sifat itu bukan sekadar kelemahan pribadi. Ketika bersemayam dalam diri para penguasa, ia berubah menjadi cara negara dijalankan. Ia melahirkan kebijakan, membentuk birokrasi, menentukan arah pendidikan, bahkan memengaruhi cara negara memperlakukan warganya.

Ketika kejahatan, kebodohan, dan kesombongan bertemu, republik memang tidak runtuh dalam sehari. Konstitusi tetap ada. Pemilu tetap berlangsung. Bendera tetap berkibar setiap Agustus. Namun kemerdekaan perlahan kehilangan maknanya.

Pengganggu Kekuasaan

Penguasa jadong selalu merasa terganggu oleh manusia yang berpikir. Mereka lebih menyukai kepatuhan daripada kreativitas, propaganda daripada pengetahuan, pencitraan daripada kenyataan, serta tepuk tangan daripada kritik.

Di sinilah hubungan antara kekuasaan dan kemerdekaan menjadi sangat jelas. Tidak mungkin melahirkan manusia Indonesia yang merdeka apabila ruang berpikirnya dipersempit. Tidak mungkin membangun warga negara yang dewasa apabila mereka terus diperlakukan sebagai objek yang harus diarahkan, bukan subjek yang berhak menentukan masa depannya sendiri.

KEBODOHAN DALAM KEKUASAAN ADALAH KETIDAKMAMPUAN MEMAHAMI KENYATAAN, KEENGGANAN BELAJAR, DAN PENOLAKAN TERHADAP PENGETAHUAN.

Penguasa yang jahat memandang jabatan sebagai hak istimewa, bukan amanah. Negara dijadikan alat memperbesar privilese, bukan sarana melayani kepentingan publik. Penguasa yang bodoh bukanlah mereka yang tidak pernah mengenyam pendidikan tinggi. Kebodohan dalam kekuasaan adalah ketidakmampuan memahami kenyataan, keengganan belajar, dan penolakan terhadap pengetahuan. Kebijakan lahir tanpa dasar ilmu, kritik dipandang sebagai gangguan, dan keputusan politik lebih ditentukan oleh kehendak daripada akal sehat.

Sementara kesombongan membuat penguasa merasa selalu benar. Kritik dianggap ancaman, perbedaan pendapat dipandang sebagai pembangkangan, sementara rakyat hanya diminta percaya dan patuh. Dalam logika seperti ini, negara tidak lagi merasa perlu menjelaskan kebijakannya kepada publik. Kekuasaan berdiri di atas rakyat, bukan di hadapan rakyat.

Bangsa ini justru lahir dari keberanian berpikir. Para pendiri republik membaca, berdebat, saling mengkritik, lalu merumuskan cita-cita bersama. Kebebasan intelektual mendahului kebebasan politik.

Ironisnya, semakin dewasa usia republik, semakin sering pengetahuan disubordinasikan oleh kepentingan kekuasaan. Universitas didorong menjadi pelaksana program pemerintah, bukan pusat pencarian kebenaran. Pendidikan lebih sibuk menghasilkan manusia yang patuh daripada manusia yang kritis. Seni dan kebudayaan dihargai selama tidak mengganggu kenyamanan penguasa.

Semua itu bukan kebetulan. Itulah cara kerja kejadongan kekuasaan. Elite yang jahat, bodoh, dan sombong memahami bahwa kekuasaan akan lebih mudah dipertahankan ketika rakyat berhenti berpikir. Ketika masyarakat sibuk



menghafal tetapi lupa bertanya. Ketika integritas dikalahkan oleh loyalitas.

Karena itu, perjuangan mempertahankan kemerdekaan hari ini bukan lagi mengangkat senjata melawan penjajah. Perjuangan kita adalah menjaga agar republik tidak dikuasai oleh elite jadong.

Merdeka Melawan

Sejarah juga menunjukkan bahwa penguasa yang jadong tidak pernah abadi. Kekuasaan yang jahat, bodoh, dan sombong selalu runtuh ketika rakyat berhenti takut.

Namun perlawanan tidak lahir dari keajaiban. Ia lahir dari kesadaran. Dari keberanian untuk berkata "tidak". Dari solidaritas yang melampaui sekat suku, agama, golongan, maupun partai. Dari kesediaan mempertahankan kebebasan berpikir meski harus berhadapan dengan intimidasi, ejekan, atau ancaman.

Kejadongan kekuasaan hanya tumbuh subur di tengah rakyat yang diam. Ia melemah ketika warga menyadari bahwa sumber kedaulatan sesungguhnya bukan berada di kursi-kursi kekuasaan, melainkan pada rakyat sendiri.

Merdeka berarti berhak menolak kejahatan, menolak kebodohan, dan menolak kesombongan kekuasaan. Hanya republik yang dipimpin oleh orang-orang yang menghormati akal sehat, menjunjung integritas, dan memuliakan manusia yang layak disebut sebagai republik yang benar-benar merdeka.



Ideologi dan Kepemimpinan dalam Revolusi Kemerdekaan Indonesia

Oleh Manuel Kaisiepo

Pengurus Alisansi Kebangsaan

Revolusi umumnya dipahami sebagai suatu proses perubahan secara radikal disertai proses restrukturisasi secara fundamental suatu sistem sosial politik dalam waktu singkat.

Keterlibatan total seluruh rakyat Indonesia dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 hingga diakuinya kedaulatan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, 2 November 1949, adalah suatu peristiwa sejarah yang dapat dikategorikan sebagai suatu revolusi, yaitu Revolusi Kemerdekaan Indonesia.

Revolusi kemerdekaan Indonesia telah membawa suatu proses perubahan radikal disertai proses restrukturisasi secara fundamental dalam masyarakat Indonesia sendiri. Pada awalnya revolusi ini adalah proses perlawanan menentang kembalinya kekuasaan kolonial, namun pada saat yang sama dia juga mendobrak struktur-struktur kekuasaan tradisional dan struktur feodal lama dalam masyarakat Indonesia sendiri.

Pergolakan lokal antara berbagai kelompok masyarakat Indonesia sendiri di berbagai daerah sepanjang 1945-1949 memperlihatkan kompleksitas perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di antaranya konflik *Uleebalang* vs *Ulema* di Aceh awal 1946, pergolakan rakyat menentang kaum bangsawan di Sumatra Utara dan Sumatra Timur, pergolakan antifeodal dan pangrehpraja di Surakarta atau yang lebih dikenal dengan "Peristiwa Tiga Daerah".

Revolusi kemerdekaan menimbulkan perubahan struktural yang radikal dalam masyarakat Indonesia sendiri. Selain mampu menggalang partisipasi dan mobilisasi rakyat secara dahsyat, juga sekaligus menyulut konflik dan kekerasan di berbagai daerah.

Revolusi kemerdekaan menimbulkan perubahan struktural yang radikal dalam masyarakat Indonesia sendiri.



Selain mampu menggalang partisipasi dan mobilisasi rakyat secara dahsyat, juga sekaligus menyulut konflik dan kekerasan di berbagai daerah. Konflik terjadi antar berbagai barisan perjuangan dengan latar belakang yang berbeda, konflik antar partai politik bahkan konflik dalam tubuh pemerintah nasional yang baru terbentuk.

Faktor Ideologi

Selain ideologi nasionalisme (kebangsaan), hadir juga berbagai ideologi lainnya yang secara bersama-sama berperan memberikan makna, menunjukkan arah, serta memberikan justifikasi dan landasan legitimasi bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Revolusi kemerdekaan Indonesia juga menunjukkan besarnya peranan kelompok-kelompok politik dengan ideologi yang beragam. Berbagai kelompok dengan ideologi yang beragam inilah yang mampu meningkatkan partisipasi politik rakyat, memobilisasi massa, dan pada saat yang sama menimbulkan persaingan dan konflik di antara mereka.

Maka di samping Soekarno-Hatta selaku pemimpin resmi negara dengan ideologi nasionalis (kebangsaan), muncul juga pemimpin lain yang memberikan fokus perjuangan berdasarkan orientasi ideologi agama (Islam), maupun ideologi sekuler seperti sosialis dan komunisme.

Berdasarkan ideologi yang dianut, masing-masing pemimpin politik mencoba memberikan kerangka atau visi perjuangan kepada para pengikutnya, memberikan gambaran ideal tentang cita-cita, tujuan dan bentuk negara serta model pemerintahan apa yang akan diterapkan bila kedaulatan telah dipulihkan.

Embrio nasionalisme yang sudah muncul sejak awal abad 19 melalui Boedi Oetomo, semakin terbentuk sosoknya pada tahun 1920an, ketika Sukarno dan Hatta serta pemimpin nasionalis lainnya berhasil membangkitkan kesadaran politik rakyat melalui berbagai organisasi dan partai politik.

Di samping para pemimpin dengan organisasi dan partai politik berbasis ideologi nasionalis (kebangsaan), juga muncul dan berperan aktif pemimpin dengan organisasi berbasis ideologi Islam maupun yang berbasis ideologi sosialis dan komunis. Meskipun mereka semua berlatar belakang ideologi yang berbeda, namun semuanya terikat dengan cita-cita yang sama, yaitu kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia.

Berbagai kelompok politik dengan latar belakang ideologi yang beragam itulah yang telah berjasa menghimpun, memobilisasi, dan menggerakkan massa rakyat melalui badan-badan perjuangan yang sengaja dibentuk untuk berpartisipasi aktif selama revolusi kemerdekaan Indonesia, 1945 -1949.

Persaingan dan Konflik

Para pemimpin perjuangan melalui partai politik maupun berbagai badan perjuangan yang dibentuk berupaya merangkul sebanyak-banyaknya massa pengikut, terutama dari kalangan pemuda.

Tetapi bersamaan dengan upaya mobilisasi massa yang dilakukan, timbul juga persaingan bahkan konflik di antara mereka sendiri.

Realitas masyarakat Indonesia yang majemuk seringkali menyebabkan persaingan dan konflik antar kelompok tersebut mencapai tingkat yang rawan: mengancam persatuan perjuangan. Konflik bukan saja karena perbedaan ideologis, melainkan juga karena perbedaan sikap dan cara perlawanan dalam menghadapi penjajah. Ada yang memilih cara moderat lewat perundingan atau diplomasi, tapi lebih banyak yang memilih cara perjuangan bersenjata.

Persaingan dan konflik ini bukan saja meningkatkan kecenderungan polarisasi yang tajam melainkan juga menyulut aksi-aksi kekerasan dan anarki dalam masyarakat. Pemerintah sipil (yang waktu itu dikuasai Partai Sosialis) berusaha memelihara posisi mereka di atas gelombang aksi dari militansi massa, pemuda, dan berbagai badan perjuangan. Namun mereka gagal mengendalikan anarki yang mulai meluas, seiring dengan kegagalan diplomasi mereka di meja perundingan menghadapi Belanda.

Namun demikian, justru persaingan dan konflik antar berbagai kekuatan perjuangan itulah yang telah ikut mendinamisir jalannya revolusi, yang pada gilirannya ikut mempercepat proses penyelesaian atas upaya-upaya diplomatik oleh partai yang menguasai kabinet maupun atas perlawanan bersenjata yang semakin intens. Puncaknya adalah pengakuan kedaulatan Indonesia pada Konferensi Meja Bundar (KMB) tanggal 2 November 1949.



Faktor Kepemimpinan

Dalam suasana gelora revolusi yang semakin membara di mana batas antara perjuangan dan anarki begitu tipis, faktor apakah yang bisa mempersatukan kembali dan mengarahkan keseluruhan proses revolusi kemerdekaan itu? Jawabannya adalah faktor kepemimpinan. Tanpa kepemimpinan kuat dan berwibawa, yang dipercaya dan diterima semua pihak, revolusi bisa berubah menjadi anarki yang menghancurkan diri sendiri.

Sejarah mencatat, diredusirnya kepemimpinan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta menjadi sekadar simbol sejak November 1945 akibat perubahan dari sistem presidensial ke sistem parlementer, menyebabkan proses revolusi berjalan seakan tanpa arah dan menimbulkan dampak yang sangat merugikan.

Perubahan ke sistem parlementer menampilkan Sjahrir dari Partai Sosialis Indonesia (PSI) sebagai Perdana Menteri (PM) sejak November 1945. Sebagai cendekiawan dan negarawan, ketokohan Sjahrir memang diakui tidak saja di Indonesia, melainkan juga di tingkat internasional. Sebagai PM dalam Kabinet Parlementer, sudah tentu visi dan kebijakan politik Sjahrir berpengaruh penting. Dia ditopang oleh partainya (PSI) yang umumnya terdiri dari kaum cendekiawan dan teknokrat berpendidikan Barat, yang umumnya berkarakter elitis.

Tetapi sejak saat itu pula tampak bahwa kepemimpinan Sjahrir (dan PSI) yang teknoratis dan elitis dengan mengutamakan politik diplomasi, tidak mendapat cukup dukungan dari semua unsur kekuatan politik saat itu. Kecendekiawanan dan teknoratis (apalagi elitisme) ternyata tidak cukup, apalagi dalam suasana psiko-politik revolusi yang tengah bergolak.

Oposisi dan berbagai kritik ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Sjahrir kemudian berkembang menjadi pembangkangan terbuka, bahkan muncul upaya kudeta terhadap dirinya. Kemunculan tokoh-tokoh pemimpin Sosialis seperti Amir Sjarifuddin maupun tokoh komunis-nasionalis seperti Tan Malaka yang tadinya diperkirakan bisa mempersatukan dan mengarahkan proses revolusi, juga ternyata gagal.

Akibatnya konflik internal dalam barisan perjuangan kembali tersulut, kekerasan dan anarki semakin meningkat, yang dengan sendirinya melemahkan keseluruhan proses perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan. Hal ini menegaskan kembali bahwa dalam perjuangan politik, apalagi revolusi, kepemimpinan merupakan faktor kunci.

Dalam suasana revolusi yang penuh persaingan, konflik, bahkan anarki, rakyat akhirnya berpaling kembali kepada pemimpin yang sudah teruji karakter serta kewibawaannya, kembali kepada Soekarno-Hatta, duet pemimpin yang tadinya coba diredusir perannya sekadar sebagai simbol sejak November 1945. Hanya Soekarno-Hatta, dengan kewibawaan dan kelebihan mereka, terbukti mampu mengendalikan serta mengarahkan revolusi yang penuh gejolak itu hingga tercapainya pengakuan kedaulatan pada 2 November 1949.

Dengan demikian menjadi jelas bahwa dalam revolusi kemerdekaan, faktor ideologi dan kecakapan intelektual-teknokratis penting, namun dua hal itu saja tidak cukup. Dalam suasana revolusi yang membara (di mana "perjuangan" dan "anarki" bercampur), maka kepemimpinan berwibawa dan dipercaya rakyat menjadi faktor yang lebih menentukan.



Penutup

'Pelajaran' apa yang bisa diambil dari refleksi historis singkat di atas? Perjuangan melawan kolonialisme adalah perjuangan maha berat, tapi perjuangan memimpin bangsa dan negara sendiri pasca kemerdekaan sesungguhnya jauh lebih berat.

Pengalaman dari periode revolusi kemerdekaan Indonesia sudah menunjukkan betapa pentingnya faktor kepemimpinan yang berwibawa dan dipercaya rakyat. Kepercayaan rakyat adalah faktor kunci sekaligus basis legitimasi paling kukuh bagi model kepemimpinan yang berhasil.

Herbert Feith pernah mengkategorikan kepemimpinan Soekarno-Hatta sebagai gabungan model kepemimpinan "solidarity maker" (Soekarno) dan model "administratur" (Hatta). Yang satu mampu menggalang solidaritas dan partisipasi rakyat, yang lainnya melengkapi dengan kemampuan tata kelola negara secara profesional-teknokratis.

Setelah 80 tahun merdeka dan menjadi negara modern, model kepemimpinan Indonesia masa kini tentulah berbasis pada keberadaan kelompok terdidik dengan kecakapan profesional-teknokratis. Tapi dalam masyarakat Indonesia yang majemuk secara kultural ditambah dengan tingkat disparitas dan kesenjangan struktural sosial ekonomi, maka tetap diperlukan juga kepemimpinan yang mampu menjaga solidaritas sekaligus soliditas seluruh rakyat.

Tata kelola negara hanya berbasis kemampuan profesional-teknokratis tapi tanpa kemampuan menggalang solidaritas dan kepercayaan rakyat, kepemimpinan model itu sesungguhnya rapuh karena tidak memiliki basis legitimasi yang kuat. Sebab, seperti pernah diungkapkan ilmuwan Barat, "*.....pada rakyat Indonesia bukan hanya pengertian dan pikiran (rasio) yang berbicara, melainkan juga hati dan perasaan*". ***





INDONESIA
BERDAULAT
ADIL DAN
MAKMUR

DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA

17 AGUSTUS 2026



Mewaspadaai Situasi yang Abnormal

Oleh Ahmad Zacky Siradj

Sekjen Aliansi Kebangsaan



Ada suasana batin yang berat dalam diskusi sejumlah tokoh lintas etnis, akademisi, aktivis sosial, dan elemen masyarakat sipil di Jakarta, Rabu (17/6/2026) lalu.

Pasalnya, bukan sekadar karena negara sedang menghadapi masalah ekonomi, politik, hukum, dan sosial yang bertumpuk. Lebih dari itu, ada kegelisahan yang jauh lebih dalam. Yaitu, bangsa ini seperti sedang bergerak dari keadaan “tidak baik-baik saja” menuju keadaan yang berpotensi abnormal.

Abnormal dalam arti apa? Abnormal ketika rakyat mulai kehilangan kepercayaan kepada negara. Abnormal ketika mahasiswa kembali turun ke jalan dengan nada kemarahan yang makin keras. Abnormal ketika tuntutan publik tidak lagi berhenti pada koreksi kebijakan, tetapi mulai menyentuh soal legitimasi kekuasaan.

Dan abnormal ketika program-program besar pemerintah yang semula dijual sebagai harapan justru berubah menjadi beban politik, beban fiskal, bahkan sumber kecurigaan baru.

Gerakan unjuk rasa mahasiswa yang belakangan mulai ramai tentu tidak boleh dibaca secara dangkal sebagai gangguan jalanan.

Ini adalah alarm. Ini adalah bunyi sirene sosial. Di dalamnya ada aneka tuntutan: hentikan pemborosan APBN, hentikan atau evaluasi total MBG, turunkan harga BBM dan kebutuhan pokok, dan tangkap para koruptor.

Bahkan, sudah mulai terdengar tuntutan yang paling ekstrem: Presiden mundur. Beberapa laporan media dan kanal publik memang mencatat tuntutan mahasiswa yang bergerak dari isu ekonomi, APBN, MBG, sampai kritik langsung terhadap pemerintah.

Tentu, tidak semua tuntutan harus diterima mentah-mentah. Tidak semua kemarahan jalanan otomatis benar. Namun, dalam negara demokrasi, kemarahan publik tidak boleh dihinakan. Ini harus didengar.

Sebab sering kali, demonstrasi mahasiswa adalah bahasa terakhir dari rakyat yang merasa bahasa biasa sudah tidak lagi didengar oleh kekuasaan.

“Jangan tunggu negara memasuki keadaan abnormal untuk bertindak normal. Jangan tunggu rakyat marah lebih jauh untuk menjadi peka. Dan jangan tunggu chaos untuk merasa perlu berubah”

Forum lintas tokoh itu melihat bahwa titik paling rumit adalah ketika tuntutan mulai mengarah kepada Presiden mundur.

Di sinilah muncul dilema besar. Jika Presiden turun, secara konstitusional Wakil Presiden otomatis menggantikan. Tetapi dalam banyak opini publik dan percakapan media, figur wakil presiden juga tidak selalu dipandang sebagai jawaban yang lebih baik.

Bahkan bagi sebagian kalangan, ia justru menyimpan problem legitimasi dan kapasitas yang tidak kecil. Namun, bila tuntutan diperluas menjadi “paket dua-duanya turun”, keadaan bisa jauh lebih berbahaya.

Negara bisa memasuki ruang gelap yang tidak mudah dikendalikan. Kekosongan legitimasi, ketidakpastian konstitusional, benturan massa, konflik elite, dan kepanikan pasar bisa bertemu dalam satu titik ledak.

Dalam situasi seperti itu, yang paling dikhawatirkan bukan sekadar pergantian kekuasaan, melainkan lahirnya chaos yang membuka pintu keadaan darurat. Dan kalau keadaan darurat terjadi, demokrasi bisa terpental.

Dalam sejarah banyak negara, kekacauan sipil sering menjadi jalan masuk bagi kekuatan keamanan untuk mengambil alih peran politik. Atas nama stabilitas, kebebasan bisa dipangkas.

Atas nama menyelamatkan negara, demokrasi bisa ditunda. Atas nama mencegah kerusuhan, suara rakyat bisa dibungkam. Itulah sebabnya, forum itu menilai bahwa jalan keluar bangsa ini tidak boleh dibiarkan jatuh ke dalam dua ekstrem: membiarkan kekuasaan berjalan tanpa koreksi, atau mendorong perubahan politik yang membuka pintu kekacauan.

Karena itu, solusi paling waras adalah Presiden harus berubah secara nyata. Bukan berubah dalam pidato. Bukan berubah dalam slogan. Bukan berubah dalam retorika panggung. Tetapi berubah dalam keputusan politik yang konkret, tegas, dan terasa langsung oleh rakyat.

Presiden harus berhenti merasa bahwa semua kritik adalah gangguan. Justru kritik adalah kesempatan terakhir untuk memperbaiki arah sebelum keadaan benar-benar lepas kendali.

Presiden harus membaca demonstrasi mahasiswa bukan sebagai ancaman terhadap dirinya, tetapi sebagai peringatan terhadap pemerintahannya. Sebab kalau peringatan ini diabaikan, kemarahan yang semula masih bisa diajak bicara bisa berubah menjadi gelombang yang tidak lagi bisa dikendalikan.

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah evaluasi total terhadap program-program besar yang bermasalah. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG, misalnya, secara gagasan tentu mulia. Tidak ada yang menolak anak-anak Indonesia mendapat makanan bergizi. Tidak ada yang menolak negara hadir memperbaiki gizi rakyat.

Tetapi gagasan baik bisa berubah menjadi malapetaka bila tata kelolanya buruk, anggarannya dipaksakan, pengawasannya lemah, dan pelaksanaannya membuka ruang korupsi.

Kritik terhadap tata kelola MBG bukan muncul dari ruang kosong. Sejumlah laporan menyebutkan adanya dugaan korupsi dalam tata kelola program MBG serta risiko sistemik seperti lemahnya seleksi mitra, pengawasan independen, dan payung hukum.

Di sisi lain, beban fiskal negara juga tidak bisa dianggap enteng. Pemerintah sendiri mencatat dalam postur APBN 2026, belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.842,7 triliun, pendapatan negara Rp3.153,6 triliun, dan defisit ditargetkan 2,68 persen terhadap PDB.

Di sinilah Presiden perlu realistis. Negara tidak bisa dikelola hanya dengan kehendak besar. Negara harus dikelola dengan kemampuan nyata. Visi besar penting, tetapi kemampuan fiskal jauh lebih penting.

Program populis boleh, tetapi jangan sampai menjadi jebakan politik dan jebakan anggaran. Jangan sampai demi menjaga gengsi politik,

Merdeka yang Sejati, Menemukan Jiwa Nusantara di Tengah Badai Zaman

Oleh Sudarsono Soedomo

Guru Besar dan Pakar Ekonomi Kehutanan serta Lingkungan IPB University



Dalam tulisan ini, saya merefleksikan makna kemerdekaan Indonesia delapan puluh satu tahun pasca-Proklamasi. Kita sering merayakan kemerdekaan sebagai sebuah garis finis—pencapaian besar yang sudah selesai pada 17 Agustus 1945. Namun, saya melihat anggapan tersebut keliru. Proklamasi adalah garis start dari sebuah maraton panjang di tengah badai zaman. Delapan puluh satu tahun setelahnya, saya menyadari kita bahkan belum selesai mengikat tali sepatu. Kita masih berdiri di garis start, sibuk memotret sepatu lari baru untuk diunggah ke media sosial, lalu bertanya-tanya mengapa pelari lain sudah jauh di depan. Secara politik kita merdeka. Tapi secara batin, kultural, dan ekologis—apakah kita benar-benar merdeka? Atau jangan-jangan, kita hanya mengganti satu bentuk penjajahan dengan bentuk lain yang lebih rapi, canggih, dan sulit dikenali? Saya melihat ada empat "badai zaman" yang menggerus kemerdekaan sejati bangsa ini.

Pertama, Badai Digital: Algoritma yang Mencuri Perhatian. Mengacu pada konsep "kapitalisme pengawasan" dari Shoshana Zuboff, saya menyoroti bahwa di era media sosial, kita bukanlah pengguna yang "berselancar", melainkan produk yang dieksploitasi.

Algoritma dirancang menahan atensi kita di layar, mengumpulkan data pribadi—apa yang kita sukai, takuti, dan beli—lalu menjual perhatian itu kepada pengiklan. Dampaknya, kita semakin terhubung secara digital, tetapi terputus secara manusiawi. Kita tahu kabar teman di luar negeri, tapi tidak tahu nama tetangga sendiri. Kita berdebat soal isu global, tapi kehilangan kemampuan mendengarkan orang berbeda pendapat di depan mata. Kita merdeka memilih tontonan, tapi tanpa sadar diprogram mesin. Saya mengibaratkan ini dengan pengalaman lucu saat membuka ponsel "hanya untuk mengecek waktu", lalu dua jam kemudian sibuk menonton tutorial membuat sabun dari minyak jelantah, padahal kita tidak punya minyak jelantah. Algoritma lebih sopan dari pencuri; ia membuat kita merasa bahwa kita yang memilih memberikannya.

Kedua, Badai Ekologis: Eksploitasi yang Merampok Masa Depan. Saya berargumen bahwa penjajahan kini tak lagi sekadar merebut ruang, tetapi menjajah waktu. Hutan ditebang bukan untuk memenuhi kebutuhan, tapi demi menumpuk keuntungan sesaat. Sungai dicemari karena perhitungan ekonomi yang mengabaikan biaya lingkungan. Udara Jakarta masuk daftar paling tercemar di dunia bukan karena kutukan, melainkan keputusan yang menempatkan profit di atas paru-paru jutaan manusia. Dalam tulisan ini, saya secara satir menyoroti paradoks masyarakat modern. Kita mengeluhkan polusi udara Jakarta, namun memesan makanan dari restoran berjarak dua ratus meter via ojek online yang menembus polusi. Kita memposting "save the earth" memakai ponsel yang baterainya sudah dua kali diganti, diproduksi di pabrik yang limbahnya mengalir ke sungai yang sedang kita doakan. Kita menyebut ini "gaya hidup sadar lingkungan versi 2026". Padahal, kita sedang merampok masa depan anak-cucu kita.

Ketiga, Badai Sosial: Hilangnya Kepercayaan dan Solidaritas. Mengacu pada karya Robert Putnam, *Bowling Alone*, saya melihat modal sosial masyarakat kian tergerus. Gotong royong yang dulunya menjadi fondasi Nusantara kini bukannya tergantikan oleh individualisme. Saya perlu menegaskan di sini: *individualisme* sejati bukanlah musuh gotong royong. Individualisme menghargai otonomi, kedaulatan diri, dan hak individu—termasuk hak orang lain. Yang menjadi lawan utama gotong royong adalah *egoisme* dan *selfisme*, sikap mementingkan diri sendiri yang mengebiri kepedulian dan merampas ruang hidup orang lain. Hari ini, masyarakat kita sibuk membangun pagar—bukan hanya pagar fisik, tapi juga pagar sosial, digital, dan psikologis—untuk melindungi egonya. Media sosial yang seharusnya menghubungkan justru memecah belah dan menciptakan *echo chamber*, ruang gema di mana kita hanya mendengar suara yang sama dengan suara kita sendiri. Orang berbeda pendapat bukan lagi dilihat sebagai sesama warga yang haknya harus dihormati, melainkan musuh yang harus dikalahkan. Ada ironi besar di sini: gotong royong hari ini berarti kita bersama-sama mengabaikan tetangga yang sedang membangun rumah, karena sibuk menggalang dana untuk korban bencana di negara lain. Kepercayaan, sebagai modal sosial paling berharga, perlahan hancur oleh egoisme kolektif ini.

Keempat, Badai Kognitif: Penjajahan atas Pikiran. Ini badai paling berbahaya karena penjajahan ini membuat yang dijajah merasa sedang dibebaskan. Saya mengkritisi masyarakat yang dengan bangga menolak ideologi asing seperti liberalisme dan komunisme karena dianggap "paham asing", namun dengan mudah menelan ideologi transnasional lain yang menuntut keseragaman berpikir dan menghapus tradisi lokal, hanya karena dikemas dalam bahasa agama. Mereka menolak gagasan asing eksplisit, tapi menelan gagasan asing implisit. Saya mengibaratkan ini seperti orang yang menolak makan nasi karena "terlalu lokal", lalu dengan bangga memakan roti gandum impor sambil berkata "ini lebih beradab", padahal perut kita dirancang untuk nasi. Nenek moyang yang mengajarkan kita berjalan kini disebut "tidak paham agama yang benar" oleh cucu-cucu yang baru belajar agama dari video berdurasi enam puluh detik. Kita merdeka dari Belanda, tapi gagal merdeka dari penjajah pikiran.

Pada titik inilah saya menyadari sebuah pertanyaan mendasar: apakah ketidakberanian mempertanyakan sesuatu pada diri sendiri merupakan tanda ketiadaan kemerdekaan berpikir? Jawabannya, pasti ya. Ketidadaan kemerdekaan berpikir ternyata tidak selalu datang dalam bentuk sensor negara atau larangan dari penguasa, melainkan dari ketakutan yang berakar di dalam diri sendiri. Ketika kita tidak berani mengajukan keraguan terhadap doktrin yang menenangkan, ketika kita gemetar mempertanyakan kesalahan yang dipaksakan oleh kelompok, maka di situlah pikiran kita sedang dipasung. Kita menolak menjadi objek ideologi Barat, tapi tanpa sadar menjadi objek ideologi transnasional yang menggerus jati diri. Dan ketika pikiran sudah terjajah, seseorang tidak akan pernah sadar bahwa ia sedang dibelenggu. Ia justru akan membela rantai yang membelenggunya dan menganggap penjajahan sebagai pembebasan.

Saya menyimpulkan bahwa keempat badai ini berakar pada satu penyakit: peradaban yang lupa cara "saling memberi" dan terjebak dalam logika "saling mengambil". Bangsa Indonesia saat ini secara formal merdeka, namun secara substansial masih terpenjara. Kita adalah spesies yang sangat menghibur; kita berlari dalam maraton, mengeluh soal badai, memotret diri di tengah badai untuk diunggah dengan *caption* "bertahan dalam perjuangan", lalu pulang dan memesan makanan dari aplikasi yang sama yang sedang kita kritik.

Sebagai jalan keluar, kita harus berhenti menjadi objek penjajahan bentuk baru. Kita harus kembali menemukan "Jiwa Nusantara"—berlandaskan Pancasila dan kearifan lokal—sebagai kompas moral menghadapi badai zaman. Saya percaya bahwa tertawa pada diri sendiri atas kemunafikan dan paradoks yang kita lakukan adalah langkah pertama menuju kesadaran, agar kita tidak lagi tertipu oleh ilusi kemerdekaan, dan mulai bertindak merdeka secara sejati. ***



Segi Tiga Besi KKN dalam Tata Kelola Sistem Politik

Oleh Prasetijono Widjojo MJ

Wakil Ketua Yayasan Dana Darma Pancasila

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) bukanlah sekadar istilah yang lahir dari masa reformasi. Ia adalah fenomena yang terus berulang, bertransformasi, dan mengakar dalam sistem politik kita.

Salah satu kerangka yang dapat menjelaskan bagaimana KKN bekerja adalah konsep *_iron triangle of corruption_* atau segi tiga besi korupsi. Tiga sisi segitiga ini terdiri dari kepentingan bisnis, kepentingan politik, dan kepentingan birokrasi. Ketiganya saling mengunci, saling menopang, dan pada akhirnya menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus.

Kepentingan Bisnis

Kelompok bisnis tentu menginginkan kemudahan dalam menjalankan usaha: lisensi, perizinan, keringanan pajak, hingga akses terhadap proyek-proyek pemerintah. Dalam sistem yang rapuh, kemudahan ini seringkali tidak diperoleh melalui mekanisme yang transparan, melainkan lewat jalur kolusi. Dunia usaha kemudian masuk ke arena politik, bukan hanya sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai penyandang dana.

Kepentingan Politik

Politisi membutuhkan modal besar untuk memenangkan pemilu dan mempertahankan kekuasaan. Biaya politik yang tinggi mendorong mereka mencari dukungan dari para pengusaha. Sebagai imbalannya, politisi memberikan perlindungan hukum, regulasi yang menguntungkan, atau akses terhadap proyek strategis.

Inilah yang disebut politik transaksional: sebuah barter kepentingan yang menjadikan demokrasi sekadar formalitas. Koalisi politik pasca pemilu pun sering dibangun bukan atas dasar visi kebangsaan, melainkan atas dasar kalkulasi biaya dan keuntungan.



Birokrasi, yang seharusnya menjadi pelayan publik, kerap terjebak dalam praktik rente. Jabatan dijadikan ladang untuk mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan, sekaligus memperkuat posisi dalam lingkaran kekuasaan. Akibatnya, tata kelola pemerintahan menjadi mahal dan tidak efisien.

Interlocking dan Blackmailing

Bisnis membutuhkan perlindungan politik, politik membutuhkan dana bisnis. Birokrasi membutuhkan legitimasi politik, sekaligus akses ekonomi. Jika salah satu pihak mencoba keluar dari lingkaran, pihak lain dapat melakukan tekanan atau ancaman.

Dari Segitiga ke Titik KKN

Di Indonesia, seringkali kepentingan bisnis, politik, dan birokrasi terpusat pada satu orang atau kelompok. Segitiga KKN pun menyusut menjadi satu titik KKN. Konsentrasi kekuasaan semacam ini melahirkan konflik kepentingan yang akut.

Lebih berbahaya lagi, jika sistem tata kelola ikut dikorupsi, maka lahirlah korupsi berjamaah. Para pemangku kepentingan bekerja sama dalam malpraktik pembangunan, menjadikan rakyat sebagai korban permanen.

Persoalan segi tiga besi KKN tidak bisa diberantas dengan pendekatan *business as usual*. Aturan yang ada seringkali hanya dijalankan secara pragmatis, tanpa ketegasan kepemimpinan.

Keringnya keteladanan dan sikap negarawan membuat bangsa ini kehilangan arah. Padahal, di tengah badai politik dan ekonomi global, Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang kuat, berintegritas, dan berani mengambil keputusan yang tegas dengan arah kebijakan yang jelas.



Demokrasi hanya akan menjadi panggung transaksional, birokrasi menjadi mesin rente, dan dunia usaha menjadi bagian dari oligarki. Rakyat pun terus menanggung biaya politik yang mahal, sementara pembangunan peradaban semakin tertinggal.

Segi tiga besi KKN adalah cermin betapa rapuhnya sistem politik, ketika kepentingan pribadi dan kelompok lebih dominan daripada kepentingan bangsa.

Jalan keluar bukan sekadar regulasi baru atau lembaga tambahan, melainkan keberanian moral dan ketegasan kepemimpinan. Tanpa itu, segitiga besi akan terus berputar, menggerogoti harapan rakyat, dan menjauhkan kita dari cita-cita bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Walaupun kemerdekaan sudah diproklamlirkan sejak 17 Agustus 1945, tanpa kepemimpinan yang kuat dan berintegritas, segitiga besi KKN akan sulit diputus mata rantainya.

Selain itu, adanya kevakuman dalam haluan negara maka arah membangun peradaban bangsa Indonesia yang bebas dan merdeka dalam bersikap, berpikir, dan bertindak semakin sulit untuk diwujudkan.***

Apa Salah Saya dan Hotel Sultan?

Oleh Pontjo Sutowo

Ketua Aliansi Kebangsaan



Saya menulis ini bukan semata-mata sebagai pengusaha. Saya menulis sebagai warga negara yang selama puluhan tahun berusaha, membangun, membayar pajak, ikut membantu berbagai agenda negara, tetapi pada akhirnya merasa diperlakukan tidak adil oleh negaranya sendiri.

Bagi saya, sengketa Hotel Sultan bukan hanya soal tanah, bangunan, atau bisnis. Ini soal rasa keadilan. Ini soal bagaimana negara memperlakukan warga negaranya. Ini soal apakah hukum masih menjadi tempat berlindung bagi rakyat, atau justru berubah menjadi alat kekuasaan yang bisa digunakan untuk mengambil alih hak orang lain secara sepihak.

Saya ingin tegaskan dari awal: saya tidak pernah berniat melawan negara. Saya bukan orang yang

ingin membangkang terhadap hukum. Jika benar negara membutuhkan Hotel Sultan untuk kepentingan negara yang sah, jelas saya akan menghormatinya.

Saya siap menyerahkan, sepanjang prosesnya benar, adil, transparan, dan sesuai hukum. Tetapi yang saya persiapkan adalah caranya. Mengapa prosesnya seperti ini? Mengapa seolah-olah kami tidak punya hak, tidak punya sejarah, dan tidak punya kontribusi?

Hotel Sultan, yang dulu dikenal sebagai Hotel Hilton, bukan dibangun dengan uang negara. Tak ada sepeserpun uang negara yang kami pakai, baik untuk memperoleh lahan, maupun untuk



Ribuan massa simpatisan Hotel Sultan keluar dan menggelar aksi unjuk rasa penolakan eksekusi pengosongan di depan Gedung Hotel Sultan, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026) pagi.

membangun seluruh gedung Hotel Sultan dan Residence di atasnya.

Jadi, hotel itu dibangun murni oleh swasta. Tepatnya oleh PT. Indobuildco, dengan segala risiko bisnisnya.

Lahan dibeli, meski dengan cicilan. Bangunan didirikan dengan biaya sendiri, termasuk melalui pinjaman bank. Usaha dijalankan, karyawan dihidupi, pajak dibayar, dan nama Indonesia ikut dijaga dalam berbagai acara besar nasional maupun internasional.

Jadi, bagaimana mungkin pemerintah bisa tiba-tiba mengklaim sebagai Barang Milik Negara (BMN)? Apalagi, sampai sekarang, tidak pernah ada bunyi putusan pengadilan manapun yang menyatakan bahwa aset kami tersebut dinyatakan sebagai BMN.

Sampai sekarang juga tidak pernah ada pelepasan hak atau dihibahkan untuk kepentingan pemerintah. Dan kami tak pernah memperoleh ganti rugi. Kalau sejak awal lahan itu tidak sah atau tidak punya dasar hukum, bagaimana mungkin bank menerima sebagai bagian dari pembiayaan? Bagaimana mungkin usaha ini berjalan puluhan tahun? Bagaimana mungkin negara menerima pajak dari kami bertahun-tahun tanpa pernah mengatakan bahwa semua ini tidak sah?

Kami bukan pihak yang menghindari dari kewajiban. Kami membayar pajak. Bahkan pajak hotel kami termasuk sangat besar, dan terbesar di kawasan Senayan dan Jenderal Sudirman. Kami tidak menunggak. Kami ikut berkontribusi kepada negara.

Dalam banyak event besar, termasuk agenda internasional, Hotel Sultan ikut menjadi bagian dari wajah Indonesia. Tetapi hari ini, semua sejarah dan kontribusi itu seolah tidak ada nilainya.

Yang membuat hati saya terluka adalah cara pengambilalihan ini. Seolah-olah cukup dengan alasan HGB habis, lalu semua bisa diambil begitu saja. Padahal, bangunan hotel itu kami yang membangun. Investasi itu kami yang keluarkan. Risiko bisnis itu kami yang tanggung.

Kalau negara memang ingin mengambil, mengapa tidak ditempuh jalan musyawarah? Mengapa tidak dihitung secara adil? Mengapa tidak ada kompensasi yang layak?

Saya merasa ada praktik kesewenang-wenangan dalam proses ini. Negara terlalu kuat jika berhadapan dengan warga negara.

Karena itu, negara seharusnya menggunakan kekuatannya dengan bijak, bukan dengan cara yang membuat warga merasa ditekan. Pemerintah semestinya menjadi pelindung keadilan, bukan pihak yang membuat rakyatnya sendiri merasa dizalimi.

Saya juga bertanya: mengapa hanya Hotel Sultan yang dipersoalkan? Di kawasan Gelora Bung Karno ada banyak aset dan usaha lain. Ada hotel-hotel lain. Ada pengelolaan lain. Kalau ini benar-benar soal penertiban aset negara, mengapa perlakuannya tidak sama? Apa salah kami? Mengapa kami yang seolah-olah harus dipaksa pergi, sementara yang lain tenang-tenang saja?

“Bagi saya, sengketa Hotel Sultan bukan hanya soal tanah, bangunan, atau bisnis. Ini soal rasa keadilan. Ini soal bagaimana negara memperlakukan warga negaranya. Ini soal apakah hukum masih menjadi tempat berlindung bagi rakyat, atau justru berubah menjadi alat kekuasaan yang bisa digunakan untuk mengambil alih hak orang lain secara sepihak”.

Pertanyaan ini penting, karena hukum tidak boleh terlihat selektif. Hukum yang hanya tajam kepada pihak tertentu akan melukai rasa keadilan publik. Kalau negara punya dasar hukum, silakan buktikan dengan proses yang terang, terbuka, dan adil. Jangan sampai keputusan administratif dipakai untuk mengalahkan hak warga negara yang telah membangun dan berkontribusi puluhan tahun.

Saya khawatir kasus ini akan menjadi preseden buruk bagi dunia usaha. Hari ini saya dan PT Indobuildco yang mengalami. Besok bisa siapa saja. Kalau pengusaha yang sudah berinvestasi puluhan tahun, membayar pajak, membangun aset, membuka lapangan kerja, dan mendukung agenda negara bisa diperlakukan seperti ini, lalu siapa yang akan merasa aman berinvestasi di Indonesia?

Investasi tidak hanya butuh peluang. Investasi butuh kepastian hukum. Pengusaha butuh rasa aman. Mereka ingin tahu bahwa apa yang mereka bangun tidak bisa tiba-tiba diambil begitu saja. Mereka ingin tahu bahwa negara hadir sebagai pelindung, bukan sebagai kekuatan yang menakutkan.

Sekali lagi, saya tidak melawan negara. Saya hanya meminta keadilan. Kalau memang Hotel Sultan harus kembali kepada negara, lakukanlah dengan cara yang benar. Duduk bersama. Bicarakan secara terbuka. Hitung hak dan kewajiban masing-masing.

Hargai investasi yang sudah kami tanam. Hargai bangunan yang kami dirikan. Hargai kontribusi kami selama puluhan tahun.

Jangan sampai alasan kepentingan negara hanya menjadi pintu masuk untuk mengalihkan pengelolaan kepada pihak lain. Kalau akhirnya aset itu hanya berpindah dari satu pengusaha ke pengusaha lain, lalu di mana letak kepentingan negaranya? Di mana letak kepentingan publiknya?

Bagi saya, hukum bukan hanya soal pasal. Hukum juga soal rasa keadilan. Hukum harus punya hati. Negara boleh kuat, tetapi jangan sampai kehilangan kebijaksanaan. Pemerintah boleh punya kewenangan, tetapi kewenangan itu harus digunakan dengan adil.

Saya menulis ini sebagai curahan hati seorang

warga negara yang merasa terluka. Saya telah berusaha menghormati negara. Saya telah membayar kewajiban. Saya telah membangun. Saya telah ikut berkontribusi. Tetapi hari ini, saya merasa diperlakukan seolah-olah semua itu tidak berarti.

Saya hanya ingin negara bersikap adil. Saya ingin proses hukum dihormati sampai tuntas. Saya ingin ada ruang dialog dan musyawarah. Saya ingin penyelesaian yang bermartabat, bukan pengambilalihan yang meninggalkan luka.

Hotel Sultan bukan sekadar bangunan. Di dalamnya ada sejarah, kerja keras, investasi, karyawan, kontribusi, dan rasa tanggung jawab. Jika negara ingin mengambilnya, ambillah dengan cara negara hukum. Bukan dengan cara yang membuat warga negaranya sendiri merasa dirampas.

Saya tetap percaya, negara yang besar bukan negara yang menang melawan warganya. Negara yang besar adalah negara yang mampu melindungi keadilan, bahkan ketika berhadapan dengan pihak yang lemah di hadapan kekuasaan. Dan hari ini, dalam perkara Hotel Sultan, saya hanya meminta satu hal: perlakukan kami dengan adil. ***



Menemukan dan Mengartikulasikan Indonesia Dari “Apa itu” menuju “Bagaimana Menjadi”

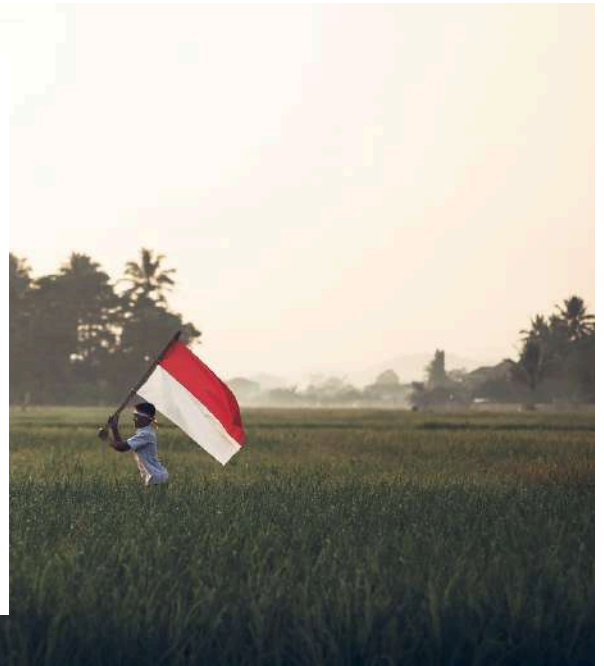
Oleh **Susetya Herawati**

Pengurus Aliansi Kebangsaan

Di tengah bising algoritma dan arus globalisasi, dua pertanyaan mendasar kembali muncul: Apa itu Indonesia? Dan yang lebih penting, bagaimana menjadi Indonesia?

Pertanyaan pertama mudah dijawab dengan data: 17.504 pulau, 3 zona waktu, batas teritorial, sistem presidensial. Namun pertanyaan kedua tidak selesai di atas kertas. Menjadi Indonesia adalah proyek peradaban. Ia menuntut penghayatan dan tindakan setiap hari, oleh setiap generasi.

Proses menjadi Indonesia bisa ditempuh melalui tiga tahap: menemukan, merenungkan, lalu mengartikulasikan.



Memahami Ruang Hidup Kepulauan

Indonesia lahir dari kondisi geologi, geografi, dan oseanografi yang unik. Kita bukan negara daratan biasa. Kita adalah negara kepulauan, negara maritim.

Yudi Latif dalam Epos Cerlang Nusantara (2025) menyebut Nusantara sebagai “epos kepeloporan” peradaban maritim dunia. John G. Butcher dan R.E. Elson dalam *Sovereignty and the Sea* (2017) mengingatkan, status kepulauan ini membawa konsekuensi geopolitik dan geostrategis yang luas.

Menemukan Indonesia berarti membangun literasi ruang. Generasi muda perlu membaca peta, memahami laut, menelaah sejarah jalur rempah, dan bertanya: apa makna “negara kepulauan” bagi cita-cita kita? Mengapa posisi silang Indonesia memaksa kita berpikir bukan hanya lokal, tapi juga global?

Tanpa tahap menemukan, kita akan salah alamat

Kebijakan yang dibuat di Jakarta bisa tidak relevan untuk nelayan di Maluku atau petani di pegunungan Papua. Menemukan adalah fondasi agar kita tidak berbicara tentang Indonesia dari ruang hampa.

Rumah Biodiversitas dan Proyek Peradaban

Setelah menemukan, kita merenung. Indonesia bukan hanya ruang fisik. Ia adalah rumah bagi keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia setelah Brasil. Jatna Supriatna dalam *Melestarikan Alam Indonesia* (2008) menegaskan: biodiversitas bukan sekadar komoditas ekspor. Ia fondasi peradaban, sumber obat, pangan, dan kearifan.

Laporan BNPB (2012) tentang kegungupian menunjukkan hal lain. Dinamika alam yang keras membentuk watak bangsa: tangguh, adaptif, gotong royong. Orang yang hidup di kaki Merapi atau di pesisir rawan tsunami belajar satu hal sejak kecil: hidup adalah kerja sama.

Indonesia juga proyek peradaban yang panjang. Yudi Latif dalam Negara Paripurna (2011) menulis: "Pancasila bukan produk instan para pendiri bangsa, melainkan kristalisasi nilai-nilai yang telah mengakar dalam peradaban Nusantara selama berabad-abad." Parakriti Tahi Simbolon dalam Menjadi Indonesia (2006) menambahkan, bangsa ini terbentuk lewat proses historis-kultural, bukan keputusan seketika.

Merenungkan Indonesia berarti menolak cara berpikir jangka pendek. Daoed Joesoef dalam Bangunlah Jiwanya, Bangunlah Badannya (2018) mengingatkan: pembangunan bukan hanya soal PDB dan infrastruktur. Ukurannya adalah perluasan "ruang sosial" — seberapa banyak warga yang bisa hidup bermartabat, berpikir kritis, dan berkarya. Kritik ini penting di era obsesi angka dan pertumbuhan semu.

Menghidupkan Ide di Zaman Kini

Tahap akhir adalah artikulasi. Indonesia bukan museum. Ia ide yang bergerak. Soekarno merumuskan Pancasila 1945. Hatta menulis Indonesia Vrij 1928 tentang kemerdekaan politik dan ekonomi. Tan Malaka melahirkan Madilog 1943 sebagai logika pembebasan. Yudi Latif dalam Muslim Inteligensia dan Kuasa (2019) menelusuri jejak intelektual Islam Indonesia dari Tjokroaminoto hingga Soekarno-Hatta.

Mengartikulasikan berarti menerjemahkan gagasan besar itu ke bahasa zaman sekarang. Lewat esai, makalah, video, diskusi kampus, kebijakan publik, atau karya seni.

Pertanyaannya begini: jika Soekarno melihat polarisasi media sosial hari ini, narasi persatuan apa yang akan ia tawarkan? Jika Hatta menelaah ketimpangan ekonomi kita, model koperasi apa yang ia revisi? Jika Tan Malaka hidup sekarang, bagaimana ia mengkritik logika konsumerisme digital?

Mengartikulasikan adalah tugas setiap warga. Dosen menulis jurnal. Guru merancang pelajaran. Pemuda membuat konten. Pejabat merumuskan kebijakan. Semua adalah bentuk artikulasi. Tanpa artikulasi, ide akan mati di perpustakaan.

Jalan Sistematis, Kurikulum BINEKA

Aliansi Kebangsaan dan Yayasan Dana Darma Pancasila menggagas Sekolah Kebangsaan: Belajar Indonesia Merdeka (BINEKA).

Kurikulumnya dirancang berjenjang agar proses tiga tahap ini tidak berhenti sebagai wacana.

Tingkat Dasar mengajak peserta menemukan Indonesia lewat Wawasan Nusantara, geografi, dan pemikiran tokoh bangsa. Tingkat Lanjut mengajak peserta merenungkan Indonesia dengan kacamata Pancasila sebagai orientasi pembangunan dan kepemimpinan. Tahap Praksis mendorong peserta mengartikulasikan Indonesia lewat proyek perubahan nyata, *leading by example*, dan kerja lintas sektor.

BINEKA bukan sekadar modul. Ia jalan sistematis membentuk Manusia Indonesia Merdeka: merdeka berpikir, merdeka bersikap, merdeka bertindak.

Pekerjaan Rumah Kita Bersama

Keindonesiaan bukan warisan yang selesai. Ia pekerjaan rumah kolektif. Kita tidak cukup bangga punya Garuda di dada. Kita harus membuktikan Garuda itu terbang lewat karya.

Rujukan pada Yudi Latif, Daoed Joesoef, Butcher-Elson, dan pemikir bangsa menegaskan satu hal: keindonesiaan terus berkembang. Maknanya harus diperbarui tiap zaman.

Tugas kita hari ini sederhana tapi berat: pindah dari tanya "apa itu Indonesia" ke jawab "bagaimana saya menjadi Indonesia" melalui pikiran, sikap, dan tindakan sehari-hari.

Karena pada akhirnya, Indonesia tidak dirayakan dengan upacara saja. Indonesia dihidupi. ***

"Keindonesiaan bukan warisan yang selesai. Ia pekerjaan rumah kolektif. Kita tidak cukup bangga punya Garuda di dada. Kita harus membuktikan Garuda itu terbang lewat karya"

RUANG DIALOG KEBANGSAAN YANG MENJANGKAU GENERASI DIGITAL



PODCAST “SAATNYA CENDEKIAWAN BICARA”



Jakarta – Di tengah arus informasi di era digital, media sosial tidak lagi sekadar menjadi ruang hiburan, tetapi juga menjadi area penting untuk membangun literasi publik. Berbagai platform digital kini dimanfaatkan oleh lembaga, komunitas, hingga organisasi masyarakat untuk menyampaikan gagasan dan membangun ruang diskusi yang lebih terbuka. Salah satu upaya tersebut dilakukan oleh Aliansi Kebangsaan melalui podcast “Tiga Ranah Pancasila”, sebuah tayangan yang mengajak masyarakat memahami nilai-nilai Pancasila melalui perspektif yang lebih kontekstual dan dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Berbeda dengan penyampaian materi kebangsaan yang identik dengan pendekatan formal satu arah, podcast “Tiga Ranah Pancasila” mengusung format percakapan santai bersama para narasumber dari berbagai latar belakang. Mulai dari akademisi, praktisi, tokoh masyarakat, hingga figur publik, setiap episode menghadirkan sudut pandang yang beragam mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa.

Pendekatan ini menjadi salah satu upaya Aliansi Kebangsaan untuk menghadirkan ruang dialog yang lebih inklusif sekaligus relevan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya generasi muda yang semakin akrab dengan konsumsi konten digital.

Keberadaan podcast ini juga menunjukkan perubahan strategi komunikasi publik yang dilakukan Aliansi Kebangsaan. Jika sebelumnya edukasi mengenai kebangsaan lebih banyak dilakukan melalui seminar, diskusi tatap muka, maupun forum akademik, kini pesan-pesan tersebut dikemas dalam format audiovisual yang lebih fleksibel dan mudah diakses kapan saja. Melalui YouTube, masyarakat dapat mengikuti pembahasan secara gratis tanpa ada batas ruang dan waktu, sehingga jangkauan penyebaran nilai-nilai Pancasila menjadi lebih luas.

Sejumlah episode bahkan berhasil menarik perhatian publik dengan jumlah penayangan yang relatif tinggi dibandingkan konten lainnya.

Beberapa diantaranya adalah “Diplomat Jujur, Kata Andovi Lopez Soal Etika Ber-Negara, Begini Diskusinya Dengan Yudi Latif! - EPS. 23”, “Membangun Manusia Indonesia Merdeka! Ini Kata Yudi Latif - EPS. 32” bersama Yudi Latif, dan “Membumikan Ekonomi Pancasila: Ini Dia Kata Prof. Dr. Ir. Agus Pakpahan, M.S! - EPS. 31”. Ketiga episode tersebut memperlihatkan bagaimana isu kebangsaan dapat dikemas melalui sudut pandang yang berbeda, mulai dari pembangunan nasional, ekonomi, hingga etika dalam kehidupan bernegara



Salah satu kekuatan utama podcast “Tiga Ranah Pancasila” terletak pada pemilihan narasumber yang beragam, mulai dari akademisi hingga figur publik. Kehadiran Yudi Latif, Prof. Dr. Ir. Agus Pakpahan M S., dan Andovi Da Lopez menghadirkan perspektif yang berbeda dalam membahas isu kebangsaan. Dipadukan dengan tema-tema yang kontekstual, seperti pembangunan nasional, ekonomi, dan etika bernegara, pembahasan terkait Pancasila menjadi lebih dekat dengan kehidupan masyarakat dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan.



Selain menghadirkan topik yang relevan, format diskusi yang dialogis membuat penyampaian materi terasa lebih ringan tanpa mengurangi substansinya. Pendekatan ini memungkinkan audiens mengikuti pembahasan secara lebih santai sekaligus memahami bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, podcast ini tidak hanya menjadi media edukasi, tetapi juga ruang diskusi yang mendorong refleksi dan partisipasi publik terhadap isu-isu kebangsaan



Kebijakan Publik dan Jalan Panjang Manusia Indonesia Merdeka

Oleh **Riski**

Awardee Bantuan Dana Penelitian Yayasan Dana Darma Pancasila Batch 3
Akademisi dan Peneliti Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)

Proklamasi Memerdekakan Bangsa, Belum Tentu Memerdekakan Manusia.

Delapan puluh satu tahun setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia telah berhasil membangun negara yang semakin kokoh. Jalan tol membentang, layanan publik terus bertransformasi, dan demokrasi telah melewati berbagai ujian. Namun, satu pertanyaan mendasar tetap layak diajukan: apakah kebijakan publik kita benar-benar telah memerdekakan manusia Indonesia? Sebab, kemerdekaan tidak hanya diukur dari berdirinya negara atau bergantinya pemerintahan, tetapi dari sejauh mana setiap warga mampu hidup bermartabat, berpikir bebas, memperoleh kesempatan yang adil, dan mengembangkan seluruh potensinya. Di sinilah perjalanan panjang manusia Indonesia merdeka masih terus berlangsung.

Kemerdekaan politik tidak selalu berbanding lurus dengan kemerdekaan manusia. Hingga kini, masih banyak warga yang menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan bermutu, layanan kesehatan, pekerjaan yang layak, dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup. Ketimpangan sosial, kemiskinan, serta rendahnya mobilitas antargenerasi menunjukkan bahwa kemerdekaan belum sepenuhnya dirasakan secara setara. Di sinilah makna kemerdekaan perlu dimaknai kembali. Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan atau keberhasilan menyelenggarakan pemilu secara berkala. Kemerdekaan juga berarti



kemampuan setiap warga negara untuk hidup bermartabat, mengembangkan potensinya, dan memperoleh kesempatan yang adil. Dengan ukuran tersebut, perjalanan memerdekakan manusia Indonesia masih menjadi pekerjaan besar yang belum selesai.

Mengapa Kemerdekaan Belum Tuntas?

Delapan puluh satu tahun setelah Proklamasi, Indonesia menunjukkan kemajuan yang tidak dapat diabaikan. Persentase penduduk miskin, jika dilihat dari kacamata Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, mengalami penurunan menjadi 8,47% atau sekitar 23,85 juta jiwa pada Maret 2025, terendah dalam dua dekade terakhir. Ketimpangan pendapatan juga menurun dengan rasio Gini sebesar 0,375, mencerminkan distribusi pendapatan yang lebih baik dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya.



Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kemerdekaan yang dirasakan seluruh warga negara. BPS mencatat bahwa tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan masih mencapai 11,03%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 6,73% di perkotaan, menunjukkan bahwa kesempatan untuk memperoleh pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, pekerjaan layak, dan mobilitas sosial belum tersebar secara merata.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan Indonesia tidak lagi sekadar membangun negara (*state building*), tetapi memastikan hasil pembangunan benar-benar memerdekakan manusia. Selama keberhasilan pembangunan lebih sering diukur dari pertumbuhan ekonomi, investasi, atau pembangunan fisik, sementara perluasan kesempatan hidup belum menjadi ukuran utama, kemerdekaan akan tetap bersifat formal. Karena itu, memasuki abad kedua kemerdekaannya, Indonesia perlu menjadikan kualitas manusia sebagai orientasi utama pembangunan. Kemerdekaan sejati tidak hanya diukur dari negara yang semakin maju, tetapi juga dari semakin banyak warga yang memiliki kebebasan, kemampuan, dan kesempatan untuk menentukan masa depannya sendiri.

Kebijakan Publik sebagai Instrumen Kemerdekaan Kemerdekaan tidak diwujudkan melalui slogan atau peringatan seremonial setiap bulan Agustus. Kemerdekaan memperoleh maknanya ketika negara mampu menghadirkannya dalam kehidupan sehari-hari melalui kebijakan publik yang adil, inklusif, dan berpihak pada manusia. Pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang mudah diakses, perlindungan sosial yang tepat sasaran, kesempatan kerja yang layak, serta ruang partisipasi publik yang terbuka merupakan wujud nyata negara memerdekakan warganya.

Ekonom peraih Nobel, Amartya Sen, menjelaskan bahwa pembangunan pada hakikatnya adalah proses memperluas kebebasan (*development as freedom*). Dengan perspektif ini, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya produk domestik bruto, tingginya investasi, atau megahnya infrastruktur, tetapi dari sejauh mana kebijakan publik mampu memperluas pilihan hidup masyarakat. Kebijakan yang baik bukan sekadar menghasilkan pertumbuhan ekonomi, melainkan menciptakan kesempatan yang setara agar setiap warga dapat belajar, bekerja, berinovasi, dan hidup secara bermartabat.

Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik merupakan jembatan yang menghubungkan cita-cita Proklamasi dengan amanat konstitusi. Setiap kebijakan semestinya tidak berhenti pada pencapaian target administratif atau indikator ekonomi makro, tetapi diarahkan untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan atau besarnya anggaran yang terserap, melainkan dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu memper-

luas kesempatan, mengurangi ketimpangan, memperkuat mobilitas sosial, dan meningkatkan kapasitas setiap warga untuk berkembang secara optimal.

Kebijakan publik bukan sekadar perangkat administratif pemerintahan, melainkan instrumen konstitusional untuk menghadirkan kemerdekaan yang bersifat substantif. Ketika setiap kebijakan mampu membuka akses pendidikan yang lebih baik, menjamin layanan kesehatan yang berkualitas, menciptakan pekerjaan yang layak, serta melindungi hak-hak dasar warga negara, berarti negara sedang menjalankan amanat konstitusinya. Di titik inilah makna kemerdekaan menjadi utuh, bukan hanya kemerdekaan sebuah bangsa dari penjajahan, tetapi kemerdekaan setiap manusia Indonesia untuk hidup bermartabat, mengembangkan potensinya, dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

Dari State Building Menuju Human Building

Selama beberapa dekade, Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan dalam memperkuat *state building*. Pembangunan infrastruktur berlangsung masif, reformasi birokrasi terus didorong melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan kualitas tata kelola pemerintahan semakin

membaik. Di sisi lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mencapai 75,90 pada 2026, meningkat secara konsisten dibandingkan dengan tahun sebelumnya, menandakan adanya perbaikan pada aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Namun, kemajuan tersebut sekaligus mengingatkan bahwa tantangan Indonesia pada abad kedua kemerdekaan tidak lagi sekadar membangun negara yang kuat, melainkan membangun manusia yang mampu memanfaatkan seluruh kemajuan itu. Karena itu, orientasi kebijakan publik perlu bergeser dari sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi menuju pengembangan kapasitas manusia (*human capabilities*).

Investasi terbesar bangsa semestinya diarahkan pada pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang merata, penguatan riset dan inovasi, penciptaan pekerjaan produktif, serta perlindungan bagi kelompok rentan. Pergeseran ini bukan berarti meninggalkan *state building*, melainkan menyempurnakannya. Negara yang kuat adalah fondasi, sedangkan manusia yang sehat, cerdas, kreatif, dan berdaya saing merupakan tujuan akhirnya. Dengan demikian, cita-cita Manusia Indonesia Merdeka menemukan makna yang paling nyata, pembangunan tidak hanya menghasilkan infrastruktur, tetapi juga melahirkan warga negara yang mampu mengubah kemajuan menjadi kesejahteraan bersama.

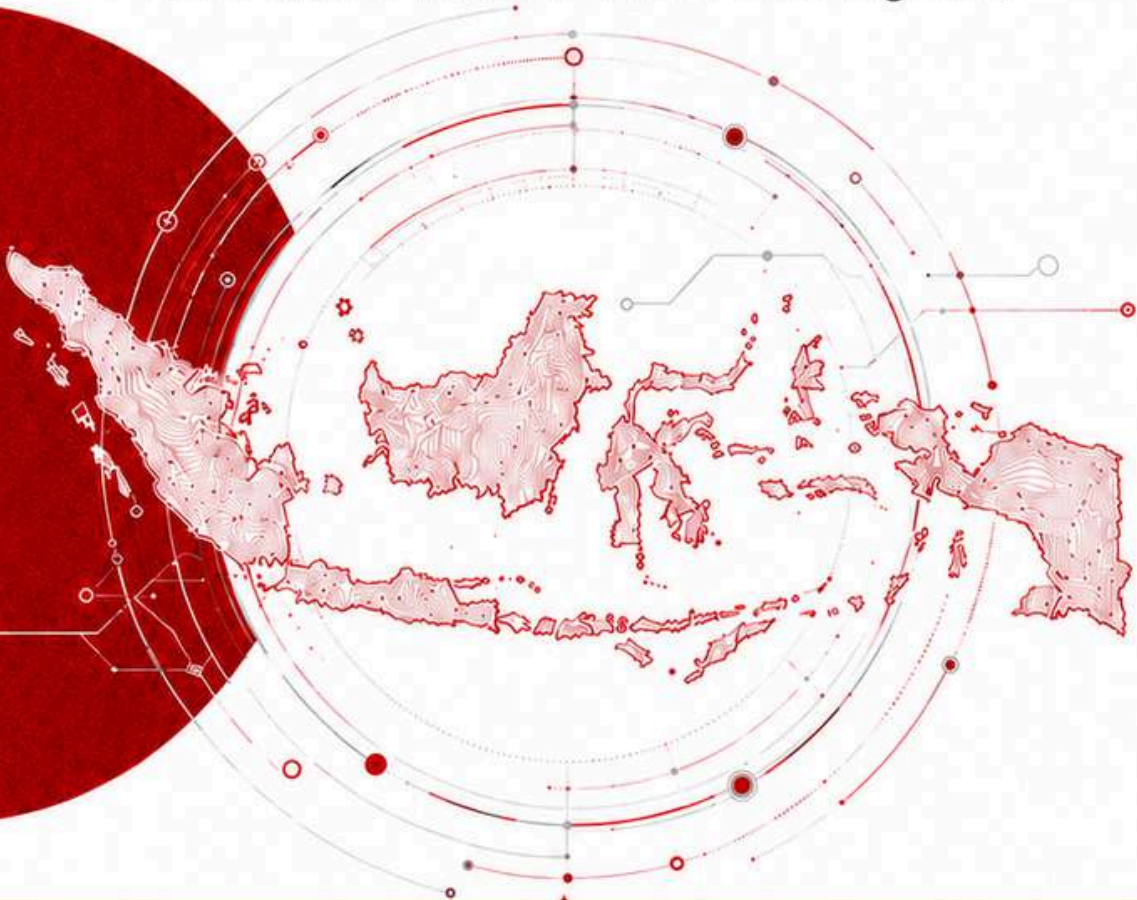


Memasuki abad kedua kemerdekaan, keberhasilan bangsa tidak lagi diukur semata dari kuatnya institusi negara atau tingginya pertumbuhan ekonomi, melainkan dari hadirnya manusia Indonesia yang sehat, cerdas, berdaya, dan bermartabat. Sebab, bangsa yang benar-benar merdeka bukan hanya mampu membangun negaranya, tetapi juga mampu memerdekakan setiap manusia yang hidup di dalamnya. ***



TERHUBUNG DALAM GAGASAN

Ikuti Kanal Resmi Aliansi Kebangsaan



YouTube

Forum Kebangsaan



Facebook

Jaring Cendekia



Website

www.aliansikebangsaan.org



Instagram

@aliansi_kebangsaan



YOUTUBE PODCAST

Saatnya Cendekiawan
Bicara



TikTok

@aliansi_kebangsaan

Potensi dan Prospek Cerah Aneka Pangan Lokal Andalan yang Digemari di Pasar Global dan Bernilai Tambah Tinggi

Oleh Retno Sri Endah Lestari

Pengurus Aliansi Kebangsaan



Indonesia yang terkenal dengan sumber daya alam (SDA) hayatinya yang melimpah dan dapat digunakan sebagai bahan pangan alternatif fungsional, seperti: sagu, sorgum, singkong, ubi jalar, porang, talas, hanjeli, jagung, jewawut, kelor, dan sukun, yang keberadaannya telah mendunia karena tahan terhadap berbagai perubahan iklim, bergizi tinggi, bermanfaat bagi kesehatan dan kosmetik serta bebas gluten.

Komoditas-komoditas tersebut diproyeksikan menjadi alternatif beras dan bahan pangan fungsional yang prospektif di pasar global dan didukung oleh nilai agroindustri, pangan alternatif, serta ketahanan pangan.

Berikut adalah beberapa contoh jenis pangan lokal Indonesia yang potensial dan prospektif di pasar global: **sagu** - sumber karbohidrat utama alternatif, khususnya di Indonesia Timur (Papua dan Maluku) yang populer sebagai bahan pangan fungsional (papeda/sagu lempang); **sorgum** - tanaman pangan tahan kekeringan, bergizi tinggi, bebas gluten, dan potensial sebagai alternatif gandum/bahan pangan sehat, dibudidayakan di NTT, Jawa Timur dan Jawa Tengah.

singkong - sangat populer dan dapat diolah menjadi berbagai produk, seperti tepung tapioka, mocaf (*modified cassava flour* atau bahan dasar pengganti terigu), dan berbagai camilan;

Pangan lokal Indonesia lainnya yakni **ubi Jalar** - sumber karbohidrat dan vitamin yang memiliki banyak varietas, serta berpotensi besar untuk industri makanan olahan sehat; **porang** - alternatif beras, mi (*shirataki*), konyaku yang rendah kalori dan karbohidrat, sehingga cocok untuk diet. Sebagai pangan fungsional, porang kaya serat larut air dan glukomanan yang efektif mengontrol gula darah, menurunkan kolesterol dan melancarkan pencernaan; **talas** - alternatif pangan dengan kandungan serat tinggi yang mulai diminati di pasar internasional; **sukun** - pangan alternatif dengan kandungan nutrisi yang sangat baik dan mudah dibudidayakan; **jagung** - pangan tradisional populer yang mudah diolah menjadi berbagai produk, seperti tepung dan pakan ternak.

Pangan lokal yang potensial dan prospektif selanjutnya adalah: hanjeli yang banyak terdapat di Jawa Barat.

Sebagai bahan pangan pengganti beras yang kaya protein, kalsium dan asam amino esensial, dengan indeks glikemik yang lebih rendah dari nasi. Sereal lokal ini baik untuk diet dan kesehatan pencernaan; **kelor** – tanaman dengan gizi tinggi (*superfood*) yang mulai populer di pasar global; **jewawut dan jelai** (*Setaria Italica/Hotong/Jawak/Sekoi/Foxtail Milet*) – sereal lokal alternatif yang bernilai gizi tinggi; *greeneration foundation* – lembaga nirlaba/organisasi non pemerintah (LSM) yang tugasnya fokus pada isu lingkungan dan berfungsi sebagai katalis ekosistem.

Berbagai aneka pangan lokal andalan tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi, terutama dalam bentuk produk olahan yang inovatif dan bernilai tambah tinggi.

Pangan lokal yang potensial dan prospektif selanjutnya adalah: **hanjeli** yang banyak terdapat di Jawa Barat, sebagai bahan pangan pengganti beras yang kaya protein, kalsium dan asam amino esensial, dengan indeks glikemik yang lebih rendah dari nasi. Sereal lokal ini baik untuk diet dan kesehatan pencernaan; **kelor** – tanaman dengan gizi tinggi (*superfood*) yang mulai populer di pasar global; **jewawut dan jelai** (*Setaria Italica/Hotong/Jawak/Sekoi/Foxtail Milet*) – sereal lokal alternatif yang bernilai gizi tinggi; *greeneration foundation* – lembaga nirlaba/organisasi non pemerintah (LSM) yang tugasnya fokus pada isu lingkungan dan berfungsi sebagai katalis ekosistem.

Berbagai aneka pangan lokal andalan tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi, terutama dalam bentuk produk olahan yang inovatif dan bernilai tambah tinggi.

Diintegrasikan dalam Tiga Ranah

Berikut adalah keterkaitan aneka pangan lokal andalan dengan kelima sila Pancasila yang diintegrasikan dalam 3 ranah, yaitu Ranah Tata Nilai, Ranah Tata Kelola dan Ranah Tata Sejahtera.

Ranah Tata Nilai merupakan wujud nyata dari sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) dan sila kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab). Dalam hal ini, sila pertama tercermin pada pemanfaatan aneka pangan lokal andalan yang merupakan wujud syukur atas anugerah keaneka-ragaman hayati yang tumbuh subur dan tersebar di seluruh Nusantara.

Adapun sila kedua, tercermin pada pengolahan dan diversifikasi aneka pangan lokal andalan yang dapat menumbuhkan-kembangkan sistem ekonomi yang menghargai jerih payah petani tradisional, serta memberikan akses pangan sehat dan bergizi secara adil. Apabila penumbuh-kembangan aneka pangan lokal andalan seperti tersebut di atas, dikaitkan dengan Tata Nilai dari Pancasila, yang mencakup moral, etika dan spiritual sebagai pandangan hidup bangsa, adalah sangat relevan karena hal ini mencakup aspek spiritual, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan sosial, dan berfungsi langsung sebagai pilar utama untuk memperkuat ketahanan nasional.

Ranah Tata Kelola merupakan wujud nyata dari sila ketiga (Persatuan Indonesia) dan sila keempat (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan). Beragamnya pangan khas dari berbagai daerah (seperti papeda dari sagu di Papua, atau nasi jagung di Jawa) menjadi pemersatu identitas bangsa yang harus dilestarikan bersama. Dengan demikian, perlu kiranya membangun kedaulatan pangan berbasis kearifan lokal. Demikian pula, sistem pertanian dan tata kelola pangan didorong melalui kearifan lokal, seperti musyawarah desa untuk menentukan pola tanam dan menjaga lumbung pangan rakyat.



Ranah Tata Sejahtera merupakan wujud nyata dari sila kelima (Keadilan Sosial dan kemakmuran ekonomi yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia). Kemandirian aneka pangan lokal andalan memastikan pemerataan ketersediaan makanan pokok bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga tidak bergantung pada impor dan meminimalkan kesenjangan.

Ketika aneka pangan lokal tersebut di atas menjadi andalan masa depan di Indonesia, maka potensi besar dan prospek cerahnya, serta dengan inovasi dan sentuhan teknologi agroindustri, aneka komoditi tersebut di atas, dapat diolah menjadi aneka produk bernilai tambah tinggi dan digemari konsumen di pasar global, sehingga dengan demikian bisa meningkatkan pendapatan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta kesejahteraan para petani yang bersangkutan dan pihak terkait lainnya.

Kegiatan ini merupakan implementasi dari paradigma pembangunan bangsa yang dirumuskan ke dalam Ranah Tata Sejahtera. Sumber daya alam hayati, khususnya yang berupa aneka pangan lokal andalan, secara jelas direpresentasikan pada lambang negara melalui gambar padi dan kapas sebagai simbol dasar pemenuhan kebutuhan pangan lokal yang sehat dan bergizi bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga terwujudlah ketahanan pangan di Indonesia untuk mendukung ketahanan ideologi Pancasila. ***



Manusia Indonesia Merdeka, Membebaskan Manusia dari Reduksi Fungsi Menuju Aktualisasi Diri

Oleh **Izza Madani**

Awardee Bantuan Dana Penelitian Yayasan Dana Darma Pancasila

Kemerdekaan Indonesia tidak hanya dimaknai sebagai terbebasnya bangsa dari penjajahan kolonial melalui Proklamasi 17 Agustus 1945. Kemerdekaan juga mengandung makna yang lebih mendasar, yaitu terbebasnya manusia dari segala bentuk penindasan yang menghilangkan martabat, kebebasan, dan kemanusiaannya. Dalam konteks tersebut, manusia Indonesia merdeka bukan sekadar warga negara yang memiliki hak dan kewajiban, melainkan pribadi yang mampu berpikir, bertindak, dan menentukan arah hidupnya secara sadar dan bertanggung jawab.

Namun, realitas masyarakat modern menunjukkan paradoks. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan globalisasi memang menghadirkan berbagai kemudahan, tetapi pada saat yang sama juga memunculkan persoalan baru berupa krisis kemanusiaan. Manusia semakin sering dinilai berdasarkan produktivitas, jabatan, keuntungan ekonomi, atau peran sosial yang dimilikinya. Nilai seseorang tidak lagi diukur dari martabatnya sebagai manusia, melainkan dari fungsi yang dapat ia jalankan dalam suatu sistem. Akibatnya, relasi antarmanusia menjadi semakin instrumental, sementara penghargaan terhadap manusia sebagai pribadi yang utuh semakin memudar.

Kondisi tersebut selaras dengan kritik filsuf eksistensial Gabriel Marcel (1933) melalui konsep *The Broken World*. Marcel menggambarkan dunia modern sebagai "dunia yang retak", yaitu keadaan ketika hubungan antarmanusia kehilangan kehangatan dan keautentikannya. Manusia tidak lagi dipandang sebagai pribadi (*being*), tetapi sebagai objek atau fungsi (*having*) yang dinilai berdasarkan manfaat dan kegunaannya. Dalam situasi demikian, relasi kemanusiaan berubah menjadi relasi fungsional yaitu seseorang dihargai karena apa yang dimilikinya atau apa yang dapat dihasilkannya, bukan karena keberadaannya sebagai manusia.



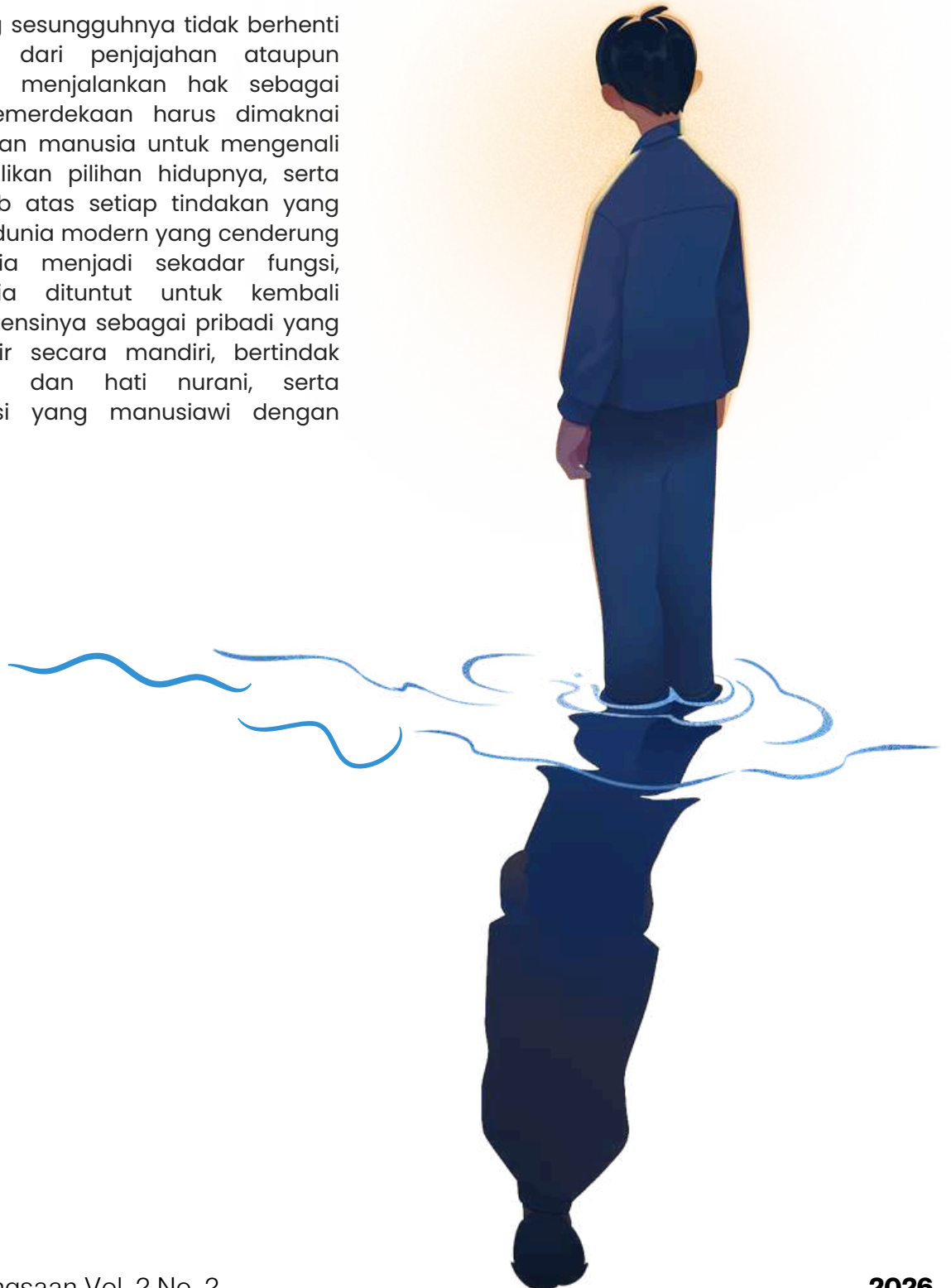
Fenomena ini melahirkan dehumanisasi, yaitu keadaan ketika manusia tidak lagi diperlakukan sebagai subjek yang bebas dan bermartabat.

Persoalan tersebut menjadi tantangan besar bagi makna manusia Indonesia merdeka pada era global. Kemerdekaan tidak cukup dimaknai sebagai kebebasan politik atau ekonomi, tetapi juga harus diwujudkan dalam kemampuan menjaga harkat dan martabat manusia di tengah derasnya arus modernisasi. Dalam perspektif psikologi humanistik, Abraham Maslow (1954) menjelaskan bahwa manusia memiliki potensi untuk berkembang hingga mencapai aktualisasi diri (*self-actualization*), yaitu keadaan ketika seseorang mampu mengembangkan seluruh potensi terbaiknya secara utuh. Aktualisasi diri hanya mungkin dicapai apabila manusia diperlakukan sebagai pribadi yang memiliki nilai intrinsik, bukan sekadar sebagai alat untuk memenuhi kepentingan orang lain atau sistem sosial.

Selain itu, pemikiran humanistik juga menegaskan bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki kebebasan, tanggung jawab, dan kemampuan untuk membentuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, kemerdekaan sejati bukan hanya terbebas dari belenggu eksternal, melainkan juga terbebas dari berbagai bentuk reduksi yang menghilangkan jati diri manusia. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", memberikan landasan moral bahwa setiap manusia harus dihormati sebagai pribadi yang bermartabat, bukan sekadar sebagai instrumen pembangunan, pasar, atau kekuasaan.

Kemerdekaan yang sesungguhnya tidak berhenti pada kebebasan dari penjajahan ataupun kebebasan dalam menjalankan hak sebagai warga negara. Kemerdekaan harus dimaknai sebagai kemampuan manusia untuk mengenali dirinya, mengendalikan pilihan hidupnya, serta bertanggung jawab atas setiap tindakan yang diambil. Di tengah dunia modern yang cenderung mereduksi manusia menjadi sekadar fungsi, manusia Indonesia dituntut untuk kembali meneguhkan eksistensinya sebagai pribadi yang utuh, yang berpikir secara mandiri, bertindak berdasarkan nilai dan hati nurani, serta membangun relasi yang manusiawi dengan sesamanya.

Kesadaran akan keberadaan diri inilah yang menjadi fondasi bagi manusia untuk tidak larut dalam arus dehumanisasi, melainkan tetap menjadi subjek yang bebas, bermartabat, dan berdaya. Pada akhirnya, manusia Indonesia merdeka adalah manusia yang mampu mewujudkan seluruh potensi terbaik yang dimilikinya, sehingga kemerdekaan tidak hanya menjadi identitas kebangsaan, tetapi juga menjadi jalan menuju aktualisasi diri sebagai manusia seutuhnya. ***



Karakter Menentukan Nasib Bangsa

Oleh **Albertus M. Patty**

Tokoh Okumene Indonesia

Mengapa setelah 81 tahun merdeka, Indonesia masih bergumul dengan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya penegakan hukum, dan semakin lebarnya kesenjangan ekonomi? Mengapa pembangunan terus berlangsung, tetapi kepercayaan publik justru terasa semakin rapuh? Dan pertanyaan yang muncul dari kegelisahan masyarakat Indonesia masa kini adalah: sebenarnya, untuk siapa kemerdekaan ini?

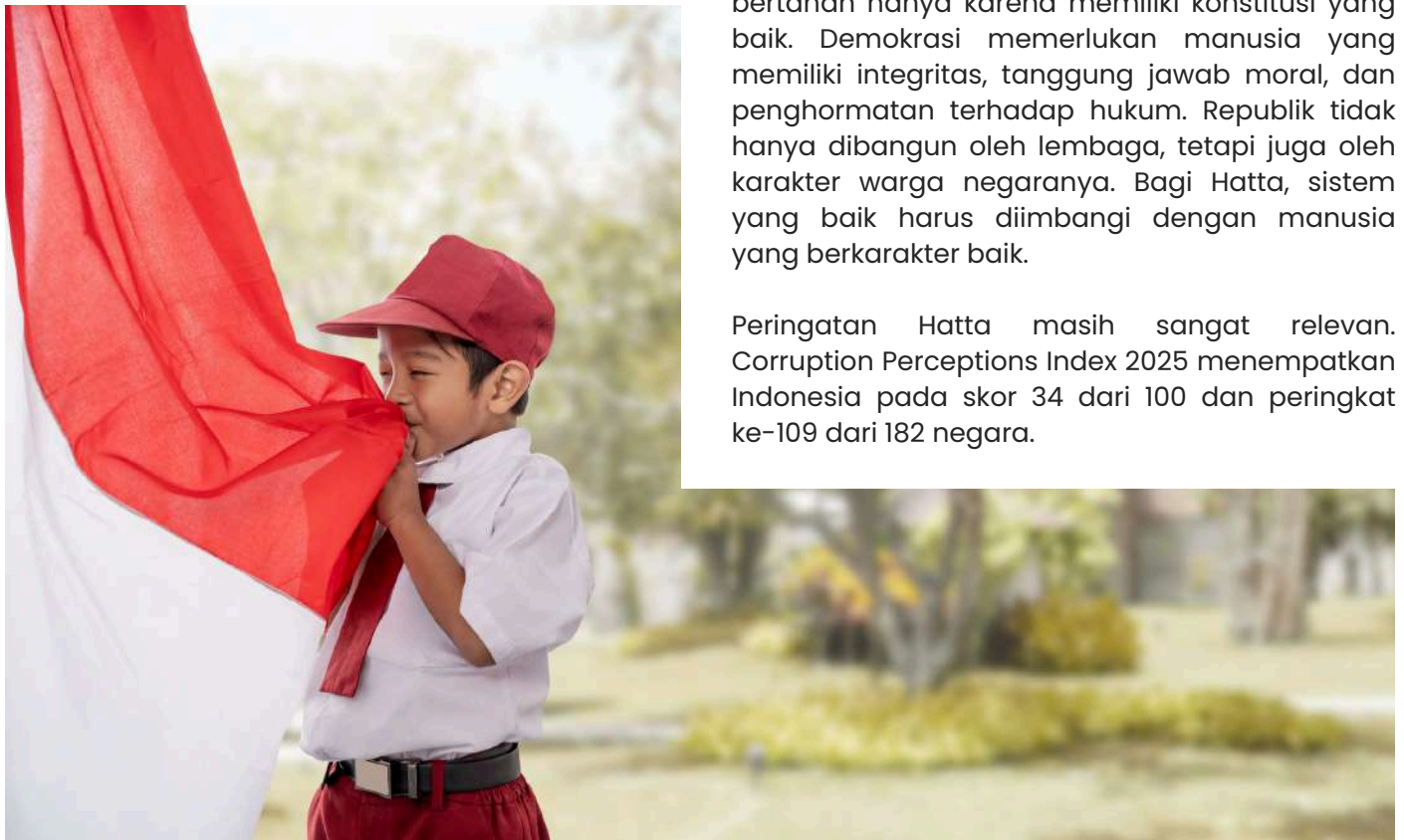
Pertanyaan itu mungkin terasa mengganggu pada saat kita merayakan Hari Kemerdekaan bangsa kita. Namun, justru karena mencintai Indonesia, kita tidak boleh berhenti pada perayaan. Kita harus berani melakukan refleksi. Sebab, sebuah bangsa hanya akan bertumbuh apabila berani bercermin, bukan sekadar bertepuk tangan atas keberhasilannya sendiri.

Ambiguitas

Tidak dapat disangkal, Indonesia telah mengalami banyak kemajuan. Infrastruktur berkembang, teknologi digital mengubah kehidupan, dan kesempatan pendidikan semakin terbuka. Ironisnya, ada realitas yang ambigu. Kemajuan itu belum berjalan secara maksimal karena berdampingan dengan kenyataan pahit lainnya: korupsi yang terus berulang, penyalahgunaan jabatan, hukum yang sering dipersepsikan tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, serta kesenjangan ekonomi dan politik yang semakin terasa. Di sinilah muncul pertanyaan menyangkut akar persoalan dari ambiguitas itu: apakah persoalan kita terutama terletak pada sistem atau pada manusia yang menjalankan sistem?

Dalam Demokrasi Kita, Mohammad Hatta mengingatkan bahwa demokrasi tidak mungkin bertahan hanya karena memiliki konstitusi yang baik. Demokrasi memerlukan manusia yang memiliki integritas, tanggung jawab moral, dan penghormatan terhadap hukum. Republik tidak hanya dibangun oleh lembaga, tetapi juga oleh karakter warga negaranya. Bagi Hatta, sistem yang baik harus diimbangi dengan manusia yang berkarakter baik.

Peringatan Hatta masih sangat relevan. Corruption Perceptions Index 2025 menempatkan Indonesia pada skor 34 dari 100 dan peringkat ke-109 dari 182 negara.



Sementara itu, World Justice Project Rule of Law Index 2025 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-69 dari 143 negara, dengan kelemahan pada aspek korupsi dan penegakan hukum. Angka-angka ini bukan sekadar statistik. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa kita perlu bekerja keras untuk membenahi sistem politik dan birokrasi kita demi membangun integritas, meningkatkan akuntabilitas, dan mengembalikan kepercayaan publik.

Namun, menurut saya, persoalan Indonesia bukan sekadar karena lemahnya sistem, melainkan juga berasal dari manusianya. Secara personal, Indonesia tidak kekurangan orang baik. Di rumah, mereka mengasahi keluarga. Di lingkungan sosial, mereka ramah dan suka menolong. Masyarakat Indonesia juga dikenal memiliki semangat keberagamaan yang kuat. Tidak heran jika Indonesia dinobatkan sebagai negara paling dermawan oleh lembaga amal dan filantropi asal Inggris, yaitu Charities Aid Foundation (CAF), melalui laporan tahunan World Giving Index (WGI). Lalu, di mana persoalannya? Yang justru mengalami defisit adalah karakter publik.

Karakter Publik

Karakter publik adalah kemampuan membawa nilai-nilai moral ke dalam ruang publik ketika seseorang menjadi pejabat, hakim, pengusaha, politisi, birokrat, pendidik, atau pemimpin masyarakat. Di situlah karakter diuji. Apakah jabatan dipandang sebagai amanah atau sebagai privilese? Apakah kekuasaan digunakan untuk melayani kepentingan bersama atau untuk memperkaya diri dan kelompok?

Kegagalan membangun karakter publik mempunyai akibat yang sangat nyata. Ketika integritas melemah, pembangunan tidak lagi dinikmati secara adil. Kesenjangan ekonomi melebar. Akses terhadap keadilan berbeda antara mereka yang kuat dan yang lemah. Pengaruh politik semakin mudah ditentukan oleh kekuatan modal. Pada titik inilah pertanyaan yang paling mengusik harus kita ajukan kembali: untuk siapa sebenarnya kemerdekaan ini?

Pertanyaan itu bukanlah penolakan terhadap kemajuan Indonesia. Sebaliknya, pertanyaan tersebut merupakan ujian moral bagi bangsa ini. Kemerdekaan kehilangan maknanya apabila hasil pembangunan hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat, sementara sebagian lainnya tetap berada di pinggir kehidupan ekonomi, hukum, dan politik

Republik ini didirikan bukan untuk melayani segelintir orang, melainkan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Kegelisahan semacam ini sesungguhnya telah lama disuarakan. Dalam Manusia Indonesia, Mochtar Lubis mengajak bangsa ini berani melakukan otokritik, terutama terhadap kelemahan karakter yang menghambat kemajuan bangsa kita. Dari perspektif antropologi, Koentjaraningrat melalui magnum opus-nya, Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan, menelisik persoalan tersebut secara lebih mendalam. Ia mengatakan bahwa karakter bangsa kita lemah karena masih lekat dengan budaya patronistik dan mentalitas feodal. Efeknya, budaya ini memengaruhi cara kita memandang kekuasaan. Loyalitas kepada pribadi sering kali lebih kuat daripada loyalitas kepada prinsip. Padahal, republik ini dibangun di atas keyakinan bahwa semua warga negara setara di hadapan hukum.

Keteladanan

Meski demikian, tidak semua tokoh politik kita membiarkan diri dikuasai oleh budaya patronistik dan mentalitas feodal. Bangsa kita masih memiliki beberapa tokoh yang menunjukkan keteladanan dengan karakter publik yang kuat. Menurut saya, ada dua tokoh teladan yang layak dikenang. Hatta menunjukkan bahwa jabatan adalah amanah, bukan alat untuk meninggikan diri. Integritasnya lahir dari konsistensi hidup yang sederhana dan jujur. Sementara itu, Sri Sultan Hamengku Buwono IX memberikan teladan yang tidak kalah penting. Sebagai seorang raja, ia mewarisi tradisi aristokrat, tetapi memilih mentransformasikannya menjadi etika republik. Ia menggunakan kewibawaannya bukan untuk mempertahankan privilese, melainkan untuk memperkuat negara.

David Brooks, dalam *The Road to Character*, membedakan antara dua jenis virtues: résumé virtues, yaitu prestasi, jabatan, dan keberhasilan, dengan eulogy virtues, yaitu kejujuran, kerendahan hati, kesetiaan, dan integritas. Sejarah menunjukkan bahwa bangsa tidak pernah runtuh karena kekurangan orang pintar yang memiliki prestasi tinggi dan hebat. Bangsa justru runtuh ketika kehilangan orang-orang yang dapat dipercaya, ketika mengalami defisit eulogy virtues. Hatta dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX adalah tokoh teladan yang memiliki keduanya.

Tantangan Terbesar

Pada usia 81 tahun kemerdekaan, tantangan terbesar Indonesia bukanlah semata-mata membangun lebih banyak jalan, pelabuhan, atau kawasan industri. Yang jauh lebih mendesak adalah membangun karakter publik: manusia Indonesia yang memandang jabatan sebagai amanah, hukum sebagai panglima, dan kepentingan bersama sebagai tujuan utama.

Tidak ada republik yang runtuh dalam satu malam. Republik runtuh sedikit demi sedikit ketika integritas dianggap tidak penting, ketika kekuasaan berubah menjadi hak untuk dilayani, dan ketika kepentingan bersama dikalahkan oleh kepentingan pribadi.

Sebab, pada akhirnya, masa depan Indonesia tidak terutama ditentukan oleh berapa banyak orang baik yang kita miliki, melainkan oleh berapa banyak orang yang mampu membawa kebaikan pribadinya ke dalam ruang publik. Itulah karakter publik yang menentukan nasib bangsa. ***



*Selamat
Ulang Tahun*

PONTJO SUTOWO

Ketua Aliansi Kebangsaan



Proklamasi Belum Usai: Saatnya Generasi Muda Memimpin Transformasi Indonesia

Oleh **Junaidi**

Awardee Bantuan Dana Penelitian Yayasan Dana Darma Pancasila Batch 3



Setiap bulan Agustus, bangsa Indonesia kembali mengenang detik-detik Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai tonggak lahirnya negara yang merdeka. Upacara, bendera Merah Putih, dan berbagai perlombaan menjadi bagian dari ekspresi syukur atas perjuangan para pendiri bangsa. Namun, di balik kemeriahan tersebut, ada satu pertanyaan yang patut terus diajukan: apakah kemerdekaan Indonesia benar-benar telah selesai diperjuangkan?

Jawabannya tentu belum. Proklamasi memang mengakhiri penjajahan fisik, tetapi belum otomatis melahirkan manusia Indonesia yang sepenuhnya merdeka. Tantangan bangsa hari ini bukan lagi merebut kemerdekaan dari kekuatan asing, melainkan membebaskan diri dari berbagai bentuk keterjajahan baru, seperti sikap apatis, ketergantungan, pragmatisme, intoleransi, rendahnya kepedulian sosial, hingga kecenderungan menjadi penonton di negeri sendiri. Dalam konteks inilah, kemerdekaan harus dimaknai sebagai proses yang terus berlangsung, sebuah transformasi yang dimulai dari manusia Indonesia itu sendiri.

Aliansi Kebangsaan melalui Manifesto Manusia Indonesia Merdeka mengingatkan bahwa perjuangan terbesar bangsa saat ini adalah membebaskan diri dari kolonialisme mental, yakni kondisi ketika bangsa kehilangan keberanian untuk berpikir mandiri, bersikap percaya diri, dan bertindak bagi kepentingan bersama. Kemerdekaan sejati tidak berhenti pada status politik sebagai negara yang berdaulat, tetapi tercermin dalam kemampuan warga negaranya untuk menjadi subjek perubahan, bukan sekadar objek pembangunan. Karena itu, transformasi Indonesia pada akhirnya bergantung pada kualitas manusia yang dimilikinya.

Di sinilah generasi muda memegang peran yang sangat menentukan. Mereka bukan sekadar pewaris kemerdekaan, tetapi pelanjut Proklamasi. Jika para pendiri bangsa memperjuangkan kemerdekaan melalui perlawanan terhadap kolonialisme, maka generasi muda masa kini bertugas menerjemahkan cita-cita Proklamasi ke dalam tindakan nyata yang menjawab persoalan zaman.

Perjuangan itu tidak lagi dilakukan dengan mengangkat senjata, melainkan melalui gagasan, inovasi, kolaborasi, dan keberanian untuk mengambil bagian dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat.

Sayangnya, pandangan terhadap generasi muda sering kali masih bersifat paradoks. Di satu sisi, mereka disebut sebagai aset bangsa dan calon pemimpin masa depan, tetapi di sisi lain, ruang untuk berpartisipasi secara bermakna masih relatif terbatas. Tidak sedikit anak muda yang hanya dijadikan pelengkap dalam berbagai program pembangunan tanpa benar-benar dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan maupun pelaksanaan perubahan. Padahal, transformasi tidak akan lahir jika generasi muda hanya diposisikan sebagai penonton.

Pengalaman di berbagai komunitas menunjukkan bahwa ketika generasi muda diberikan kepercayaan dan ruang untuk berkontribusi, mereka mampu menjadi penggerak perubahan yang nyata. Dalam penelitian yang saya lakukan di Sanggar Lingkaran, Desa Denai Lama, Deli Serdang, misalnya, keterlibatan generasi muda tidak berhenti pada aktivitas sukarela semata. Mereka menginisiasi berbagai kegiatan pendidikan, melestarikan seni dan budaya lokal, mendampingi anak-anak belajar, mengembangkan wisata edukasi berbasis masyarakat, hingga membangun kolaborasi dengan berbagai pihak. Keterlibatan tersebut bukan hanya memperkuat kapasitas individu, tetapi juga menghasilkan dampak sosial yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa transformasi bangsa sesungguhnya tumbuh dari keterlibatan kewarganegaraan (civic engagement). Ketika generasi muda merasa memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya, mereka belajar menjadi warga negara yang aktif, mampu bekerja sama, menghargai keberagaman, serta menghadirkan solusi atas berbagai persoalan publik. Nilai-nilai inilah yang menjadi fondasi manusia Indonesia yang merdeka: bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki empati, integritas, dan keberanian bertindak demi kepentingan bersama.

Transformasi yang dipimpin generasi muda juga memiliki makna strategis bagi masa depan Indonesia

Bonus demografi yang sedang dinikmati bangsa ini tidak akan menjadi keuntungan apabila hanya dipandang sebagai besarnya jumlah penduduk usia produktif. Bonus tersebut baru menjadi kekuatan apabila generasi mudanya memiliki karakter, kompetensi, kreativitas, dan komitmen kebangsaan. Tanpa itu, bonus demografi justru dapat berubah menjadi beban demografi yang memperbesar pengangguran, konflik sosial, dan ketimpangan.

Karena itu, membangun generasi muda tidak cukup melalui pendidikan yang berorientasi pada capaian akademik semata. Pendidikan harus menjadi ruang untuk membentuk manusia yang berpikir kritis, mampu berkolaborasi, mencintai budaya bangsa, serta memiliki kepedulian terhadap persoalan masyarakat. Ruang-ruang partisipasi juga harus diperluas agar generasi muda memperoleh kesempatan memimpin berbagai inisiatif sosial, budaya, ekonomi, maupun lingkungan. Semakin banyak anak muda yang terlibat dalam menyelesaikan persoalan bersama, semakin kuat pula fondasi transformasi Indonesia.

Proklamasi 1945 telah memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Namun, mewujudkan manusia Indonesia yang benar-benar merdeka adalah tugas setiap generasi. Generasi muda hari ini tidak lagi diminta mengulang perjuangan para pendiri bangsa, tetapi melanjutkan semangatnya dalam bentuk yang relevan dengan tantangan masa kini. Mereka dipanggil untuk membangun masyarakat yang lebih berkeadilan, memperkuat persatuan di tengah keberagaman, menjaga budaya sebagai identitas bangsa, memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab, dan menghadirkan inovasi yang memberi manfaat bagi sesama.

Pada akhirnya, kemerdekaan bukan sekadar peristiwa yang diperingati setiap tahun, melainkan proses yang terus dihidupkan melalui tindakan. Proklamasi akan tetap menjadi peristiwa bersejarah apabila hanya dikenang, tetapi akan menjadi kekuatan transformasi apabila diteruskan oleh generasi muda yang berani berpikir merdeka, bersikap merdeka, dan bertindak merdeka. Masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh seberapa megah pembangunan fisik yang dibangun hari ini, melainkan oleh seberapa banyak generasi muda yang memilih untuk terlibat, memimpin perubahan, dan mengabdikan kemampuan terbaiknya bagi kemajuan bangsa. Di tangan merekalah cita-cita Proklamasi menemukan maknanya yang paling nyata.***

RUBRIK KHUSUS

YUDI LATIF

Prabowo: Ambisi Besar dalam Defisit Kapabilitas

Saudaraku, salah satu karakter paling menonjol dari pemerintahan Prabowo adalah keberanian berpikir dalam skala besar. Ketika banyak pemimpin terjebak dalam manajemen rutinitas dan program-program kecil yang minim daya ungkit, Prabowo justru memilih jalur sebaliknya: meluncurkan kebijakan yang ambisius, luas, dan menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan dua contoh yang paling jelas. Keduanya lahir dari tujuan yang sulit ditolak. MBG ingin memperbaiki kualitas gizi anak Indonesia dan memperkuat fondasi sumber daya manusia masa depan. KDMP ingin memperpendek rantai distribusi, memperkuat posisi tawar petani dan nelayan, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang lebih mandiri.

Dari sisi tujuan, kedua program tersebut menjawab persoalan nyata. Tidak ada yang keliru dengan diagnosis bahwa Indonesia masih menghadapi masalah gizi, ketimpangan pembangunan, lemahnya posisi produsen kecil, dan fragmentasi ekonomi desa.

Jurang antara keinginan dan cara mencapainya

Persoalannya bukan terletak pada apa yang ingin dicapai, melainkan pada bagaimana mencapainya.

Dalam banyak kebijakan yang diluncurkan, tampak keyakinan bahwa masalah besar membutuhkan intervensi besar dari negara. Semakin luas persoalan yang dihadapi, semakin besar pula organisasi, anggaran, dan mobilisasi yang dianggap diperlukan untuk menyelesaikannya.

Di atas kertas, logika tersebut tampak masuk akal. Namun sejarah pembangunan menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak ditentukan oleh besarnya ambisi, melainkan oleh kemampuan institusi untuk menerjemahkan ambisi tersebut menjadi praktik yang berjalan sehari-hari.

Disinilah pertanyaan mendasar perlu diajukan.

Apakah negara sedang membangun solusi yang berkelanjutan, atau sekadar membangun struktur yang terlihat besar?

Sejarah Indonesia memberikan banyak pelajaran mengenai batas-batas mobilisasi dari atas. Pada era Demokrasi Terpimpin, pemerintah berupaya menggerakkan berbagai organisasi ekonomi rakyat melalui pendekatan politik yang sangat sentralistik. Pada masa Orde Baru, ribuan Koperasi Unit Desa (KUD) dibentuk untuk menopang pembangunan pedesaan.

Sebagian memang berfungsi, terutama ketika terhubung dengan program distribusi pupuk dan pemasaran hasil pertanian.



RUBRIK KHUSUS

YUDI LATIF

Namun tidak sedikit yang hidup karena instruksi dan fasilitas negara, bukan karena kebutuhan ekonomi anggota. Ketika dukungan birokrasi berkurang, banyak koperasi kehilangan aktivitas dan berubah menjadi bangunan organisasi tanpa kehidupan ekonomi yang memadai. Pengalaman ini menunjukkan bahwa membangun organisasi jauh lebih mudah daripada membangun institusi yang benar-benar hidup.

Persoalan KDMP dan MBG

Kritik terhadap KDMP memberikan ilustrasi yang menarik. Persoalan utama program ini bukanlah koperasinya. Koperasi telah terbukti berhasil di banyak negara sebagai instrumen ekonomi rakyat. Yang menjadi persoalan adalah pendekatan yang digunakan untuk membangunnya.

Koperasi pada hakikatnya merupakan organisasi ekonomi yang tumbuh berdasarkan kebutuhan anggotanya. Keberadaannya ditopang oleh partisipasi, berkembang melalui manfaat yang diberikan, dan bertahan karena tumbuhnya rasa memiliki di kalangan anggota.

Oleh karena itu, kekuatan utama koperasi tidak terletak pada bangunan, kendaraan operasional, maupun besarnya modal awal, melainkan pada keterlibatan anggota serta manfaat sosial-ekonomi yang mereka peroleh secara nyata.

Ketika koperasi dibentuk melalui target administratif yang seragam, muncul risiko bahwa organisasi memang berdiri, tetapi aktivitas ekonominya tidak tumbuh. Struktur terbentuk, tetapi fungsinya lemah. Gedung berdiri, tetapi kegiatan usahanya tidak berkembang.

Pengurus terbentuk, tetapi anggota tidak merasa memilikinya.

Dalam kondisi seperti itu, koperasi berpotensi berubah menjadi instrumen pelaksanaan program pemerintah, bukan menjadi institusi ekonomi rakyat.

Masalah yang serupa dapat ditemukan pada MBG.

Tidak banyak yang menolak pentingnya gizi bagi anak-anak Indonesia. Namun skala program yang sangat besar menuntut kapasitas yang sama besarnya. Pengadaan bahan baku, pengolahan makanan, distribusi, pemberdayaan UMKM setempat, ketepatan sasaran penerima manfaat, pengawasan kualitas, pengelolaan anggaran, hingga evaluasi dampak harus berjalan secara konsisten setiap hari dalam jumlah yang sangat besar.

Pertanyaannya bukan apakah program ini mulia. Pertanyaannya adalah apakah penerima manfaat telah ditetapkan secara tepat, apakah agen pengelola memiliki kapabilitas yang memadai, dan apakah kapasitas kelembagaan yang tersedia sudah cukup kuat untuk menjamin kualitas pelaksanaan yang merata di seluruh Indonesia.

Kegagalan dan Keberhasilan Kebijakan Publik

Dalam kebijakan publik, kegagalan sering kali tidak terjadi karena tujuan yang salah. Kegagalan justru muncul ketika kemampuan implementasi tidak sebanding dengan besarnya ambisi yang diusung.

Karena itu, terdapat pola yang tampak pada kedua program tersebut. Negara terlihat sangat cepat membangun organisasi, tetapi

RUBRIK KHUSUS

YUDI LATIF

belum tentu andal dalam membangun kapasitas organisasi.

Mendirikan koperasi lebih mudah daripada membangun budaya berkoperasi.

Membangun dapur lebih mudah daripada menjaga kualitas layanan secara konsisten selama bertahun-tahun.

Mengalokasikan anggaran lebih mudah daripada memastikan setiap rupiah menghasilkan manfaat yang sepadan.

Dalam konteks ini, kritik yang paling relevan terhadap pemerintahan Prabowo bukanlah bahwa program-programnya terlalu besar.

Indonesia memang membutuhkan terobosan besar untuk keluar dari berbagai persoalan struktural yang telah berlangsung lama.

Kritik yang lebih mendasar adalah adanya kecenderungan menempatkan mobilisasi sebagai solusi utama, sementara pembangunan institusi sering kali membutuhkan proses yang lebih panjang, lebih sabar, dan lebih bertahap.

Institusi yang kuat tidak lahir dari instruksi. Ia lahir dari insentif yang tepat, tata kelola yang baik, kompetensi yang memadai, dan kepercayaan yang tumbuh dari pengalaman.

Karena itu, ukuran keberhasilan kebijakan tidak boleh hanya diukur dari jumlah koperasi yang terbentuk, jumlah bangunan yang dibangun, jumlah dapur yang beroperasi, atau jumlah anggaran yang terserap.

Ukuran keberhasilannya harus lebih substantif

Negara tidak boleh hanya mengejar jumlah koperasi yang berdiri. Negara harus

memastikan koperasi tersebut mampu menghidupkan partisipasi anggota dan menciptakan nilai ekonomi yang nyata bagi mereka.

Sebab koperasi yang sehat tumbuh dari kebutuhan anggotanya, bukan dari target administrasi pemerintah.

Negara juga tidak boleh hanya mengejar jumlah makanan yang dibagikan. Negara harus memastikan bahwa program tersebut benar-benar meningkatkan status gizi, kualitas belajar, dan kualitas hidup generasi yang akan datang.

Penutup

Pada akhirnya, tantangan terbesar kepemimpinan Prabowo bukanlah membuktikan bahwa negara mampu bergerak dalam skala besar. Tantangan terbesarnya adalah membuktikan bahwa ambisi yang besar dapat ditopang oleh institusi yang kuat.

Sebab sejarah tidak menilai pemimpin dari besaran dan banyaknya program yang diluncurkan, melainkan dari kemampuan program-program tersebut bertahan, berkembang, dan tetap memberikan manfaat ketika euforia politik telah lama berlalu.



RUBRIK KHUSUS

YUDI LATIF

Menyiapkan Sekoci bagi Penumpang Kapal Retak

Saudaraku, Indonesia hari ini seperti sebuah kapal yang lambungnya dipenuhi retakan. Air tak lagi sekadar merembes; ia masuk tanpa bisa dibujuk berhenti. Awak kapal sibuk menimba, sementara laju kebocoran selalu lebih cepat daripada tenaga yang tersisa. Kita masih menatap dermaga di kejauhan, tetapi ada saat ketika harapan tak lagi cukup untuk mengubah hukum kenyataan.

Kapal yang demikian bukan sedang berlayar menuju pelabuhan. Ia sedang berpacu menuju karam di tengah jalan.

Dalam keadaan seperti itu, kebijaksanaan bukan lagi soal mempertahankan gengsi kapal, melainkan menyelamatkan setiap jiwa di atasnya. Sebab, tidak ada kemenangan dalam memaksa sebuah bahtera yang rapuh menggenapi pelayaran jika harga yang dibayar adalah tenggelam bersama seluruh penumpangnya.

Namun, yang paling berbahaya bukanlah kebocoran itu sendiri. Yang paling berbahaya adalah penyangkalan. Ketika retakan dianggap goresan biasa, ketika ruang-ruang yang kemasukan air disebut masih aman, ketika orang yang memperingatkan bahaya justru dituduh menyebarkan kepanikan, sesungguhnya kapal telah kehilangan arah jauh sebelum kehilangan daya apung.

Bukankah kita telah terlalu lama hidup dalam kebiasaan seperti itu? Korupsi disebut kewajaran. Ketimpangan dianggap harga pembangunan. Hukum menjelma alat tawar-menawar. Kekuasaan lebih sibuk merawat citra daripada memperbaiki fondasi. Kita mengecat dinding kapal yang lapuk, memasang layar baru, menghias geladak, sementara lunasnya terus digerus air asin.

Kita merayakan ilusi bahwa semuanya masih terkendali, padahal bunyi kayu yang merekah semakin keras terdengar dari bawah kaki kita. Ada saat ketika sebuah kapal masih bisa diselamatkan dengan tambalan. Tetapi ada pula saat ketika tambalan hanyalah cara menunda karam.

Pada titik itulah, keberanian diuji.

Keberanian bukanlah memaksa kapal mencapai dermaga demi menjaga martabat para nakhodanya. Keberanian adalah mengakui bahwa kapal ini mungkin tidak lagi sanggup membawa seluruh penumpangnya hingga tujuan. Dan pengakuan itu bukanlah kekalahan. Ia adalah awal dari penyelamatan.

Yang harus diselamatkan bukan kapal. Yang harus diselamatkan adalah manusia.

Maka sekoci dan pelampung bukanlah lambang menyerah. Ia adalah lambang akal sehat yang masih hidup. Ia adalah rencana kedaruratan ketika keadaan tak lagi dapat dipaksa kembali normal. Setiap masyarakat yang matang selalu menyiapkan jalan keluar sebelum bencana mencapai puncaknya, sebab mereka tahu bahwa kepanikan adalah harga dari kelalaian.

Demikian pula sebuah bangsa.

Ketika kerusakan telah menjalar ke hampir seluruh organ kehidupan—politik, hukum, ekonomi, pendidikan, birokrasi, hingga moral publik—yang dibutuhkan bukan lagi tambalan kebijakan yang bersifat sementara. Yang dibutuhkan adalah keberanian melakukan pembedahan terhadap tatanan yang selama ini justru memproduksi retakan-retakan baru.

RUBRIK KHUSUS

YUDI LATIF

Pembedahan bukanlah penghancuran. Pembedahan adalah prosedur penyelamatan.

Seorang dokter yang membelah tubuh pasien bukan sedang membenci tubuh itu. Ia justru sedang berusaha mempertahankan kehidupannya. Pisau bedah memang melukai, tetapi ia melukai agar luka yang lebih besar dapat dihentikan. Demikian pula bangsa ini. Ada saat ketika mempertahankan sistem yang sakit justru menjadi tindakan paling berbahaya, sementara membongkar dan membangunnya kembali adalah bentuk cinta yang paling bertanggung jawab.

Karena itu, keberanian hari ini bukan sekadar keberanian mengganti pemimpin, melainkan keberanian memeriksa ulang seluruh rancangan rumah kebangsaan: bagaimana kekuasaan dibatasi, bagaimana hukum dibebaskan dari kepentingan, bagaimana kekayaan negeri dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat, bagaimana pendidikan membentuk manusia yang merdeka berpikir, dan bagaimana negara kembali menjadi pelayan kehidupan, bukan pelayan segelintir kepentingan.

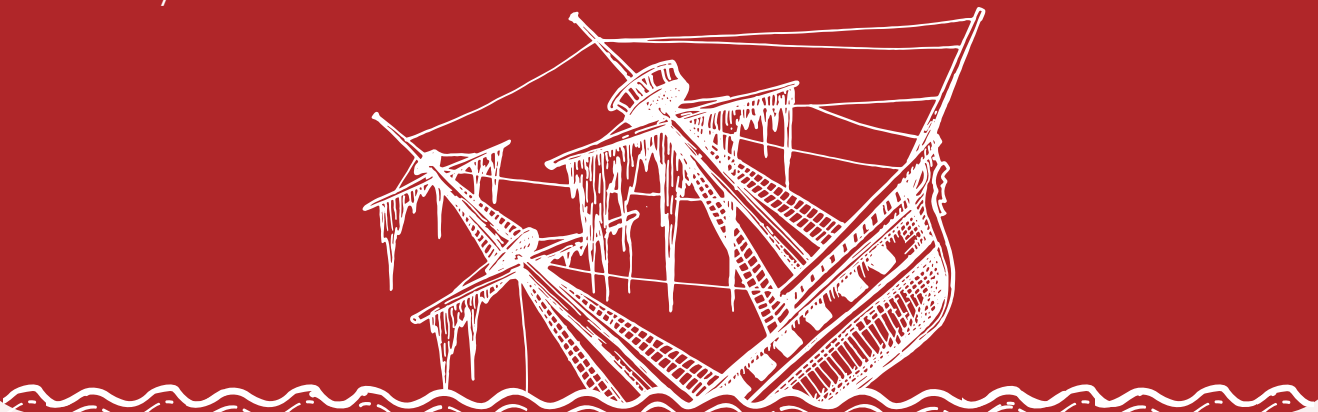
Sejarah tidak pernah mengingat tinggi tiang layar, megahnya lambung, atau indahnya cat pada badan kapal. Sejarah hanya mengingat apakah, ketika retakan itu tak lagi dapat ditambah, masih ada cukup kebijaksanaan untuk menyelamatkan manusianya.

Sebab bangsa tidak pernah identik dengan kapalnya. Bangsa adalah orang-orang yang selamat. Bangsa adalah mereka yang berani belajar dari hampir karamnya sebuah pelayaran. Bangsa adalah mereka yang, setelah menepi dengan sekoci dan pelampung, bergotong royong membangun bahtera baru dari pengalaman, kejujuran, dan keberanian.

Dunia baru tidak pernah lahir dari penyangkalan. Ia lahir dari keberanian mengakui kenyataan, menyiapkan penyelamatan, dan melakukan pembaruan yang selama ini ditunda. Sebab, retakan yang terus disangkal tidak akan pernah menutup dirinya sendiri. Setiap penundaan hanya membuat air semakin dalam, sementara kesempatan untuk menyelamatkan semua orang semakin tipis.

Masih ada sedikit waktu untuk memilih.

Bukan memilih antara optimisme atau pesimisme. Bukan memilih antara mempertahankan kapal lama atau mengutuknya hingga tenggelam. Melainkan memilih apakah kita akan terus memoles lambung yang telah rapuh, atau dengan keberanian yang jernih melakukan penyelamatan, membedah yang sakit, dan menyiapkan bahtera baru yang lebih adil, lebih kokoh, dan lebih layak membawa seluruh anak bangsa menuju dermaga yang kita impikan.



RUBRIK KHUSUS

YUDI LATIF

Indonesia Tak Akan Selamat?

Saudaraku, Indonesia tidak akan selamat jika terus membiasakan hidup melampaui batas kemampuannya. Jika hasrat untuk mengonsumsi tumbuh lebih cepat daripada kemampuan untuk menghasilkan. Jika pengeluaran terus melampaui pendapatan. Jika utang terus digunakan untuk membiayai kenikmatan hari ini tanpa memperbesar kemampuan menciptakan kemakmuran esok hari.

Kecuali bangsa ini kembali menegakkan disiplin yang menjadi dasar setiap kemajuan: menghasilkan lebih banyak daripada yang dikonsumsi, menabung lebih banyak daripada yang dihaburkan, dan memastikan bahwa utang digunakan untuk memperbesar kapasitas produktif bangsa, bukan beban yang membelenggu masa depan.

Indonesia tidak akan selamat jika terus menggantungkan harapan pada apa yang tersimpan di bawah tanah. Minyak akan habis. Tambang akan menipis. Harga komoditas akan naik dan turun mengikuti gelombang dunia. Tidak ada bangsa yang dapat membangun masa depannya hanya dengan menjual warisan alam yang tidak dapat diperbarui.

Kecuali kita mampu mengubah kekayaan alam menjadi kekayaan pengetahuan, mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai tambah tinggi, dan menjadikan inovasi sebagai sumber utama daya saing bangsa.

Indonesia tidak akan selamat jika jumlah penduduk yang besar hanya menjadi kebanggaan statistik.

Sebab jumlah manusia tidak otomatis melahirkan kekuatan. Bonus demografi dapat menjadi berkah, tetapi juga dapat berubah menjadi beban.

Kecuali pendidikan, kesehatan, keterampilan, dan pembentukan karakter ditempatkan sebagai investasi nasional yang paling utama. Sebab yang menentukan masa depan bukan berapa banyak manusia yang kita miliki, melainkan berapa banyak manusia yang mampu berpikir, berkarya, dan menciptakan nilai bagi sesamanya.

Indonesia tidak akan selamat jika ilmu pengetahuan kehilangan tempat terhormat dalam kehidupan bangsa. Jika sensasi lebih dihargai daripada prestasi. Jika keramaian lebih dipuja daripada pemikiran. Jika jawaban lama terus diulang ketika zaman sedang melahirkan pertanyaan-pertanyaan baru.

Kecuali bangsa ini kembali meninggikan martabat guru sebagai pengembang kualitas manusia, memuliakan tradisi keilmuan, memperkuat riset, dan memberi tempat terhormat kepada mereka yang bekerja dalam kesunyian untuk memperluas batas pengetahuan dan membuka kemungkinan-kemungkinan baru bagi masa depan.

Indonesia tidak akan selamat jika korupsi terus menggerogoti sendi-sendi kehidupan bersama. Sebab yang dihancurkan korupsi bukan hanya uang negara, melainkan kepercayaan. Dan ketika kepercayaan runtuh, hukum kehilangan wibawa, institusi kehilangan kehormatan, dan masyarakat kehilangan keyakinan bahwa kejujuran masih memiliki arti.

RUBRIK KHUSUS

YUDI LATIF

Kecuali integritas dijadikan fondasi dalam penyelenggaraan negara, hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, dan setiap pemegang amanah menyadari bahwa kekuasaan adalah tanggung jawab, bukan kesempatan untuk memperkaya diri.

Indonesia tidak akan selamat jika terlalu sibuk memikirkan kemenangan hari ini dan melupakan keberlangsungan hari esok. Jika energi bangsa habis untuk perebutan kekuasaan jangka pendek sementara pekerjaan besar membangun masa depan terus ditunda.

Kecuali para pemimpin berani memikirkan generasi berikutnya lebih serius daripada pemilu berikutnya, serta berani menanam benih-benih pembangunan yang hasilnya mungkin baru dapat dipetik puluhan tahun kemudian.

Indonesia tidak akan selamat jika kemajuan hanya dinikmati oleh segelintir orang sementara sebagian besar rakyat tertinggal di belakang. Sebab ketimpangan yang terus melebar perlahan mengikis rasa kebersamaan yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa.

Kecuali pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan pemerataan kesempatan, perluasan akses pendidikan dan kesehatan, serta hadirnya negara untuk melindungi mereka yang paling rentan dari arus perubahan.

Indonesia tidak akan selamat jika perbedaan yang semestinya menjadi kekayaan berubah menjadi sumber kecurigaan dan permusuhan. Bangsa ini lahir bukan karena kesamaan suku, agama, bahasa, atau asal-usul. Bangsa ini lahir karena kesediaan untuk hidup bersama dalam satu cita-cita kebangsaan.

Kecuali kita terus merawat persatuan, memperkuat kepercayaan antarkelompok, dan menempatkan identitas kebangsaan sebagai rumah bersama yang menaungi seluruh perbedaan.

Indonesia tidak akan selamat jika perubahan teknologi bergerak lebih cepat daripada kemampuan bangsa untuk memahaminya. Dunia sedang berubah dengan kecepatan yang belum pernah disaksikan dalam sejarah manusia. Yang paling berbahaya bukanlah perubahan itu sendiri, melainkan ketidaksiapan menghadapinya.

Kecuali pendidikan, riset, inovasi, dan penguasaan teknologi dijadikan gerakan nasional yang melibatkan negara, dunia usaha, kampus, dan masyarakat secara bersama-sama.

Dan pada akhirnya, Indonesia tidak akan selamat jika kehilangan arah yang lebih besar daripada sekadar pertumbuhan ekonomi dan perebutan kekuasaan. Sebab bangsa dapat bertahan menghadapi kemiskinan. Bangsa dapat bangkit dari krisis. Bangsa dapat pulih dari kekalahan. Tetapi bangsa yang kehilangan cita-cita akan perlahan kehilangan alasan untuk bergerak ke depan.

Kecuali bangsa ini tetap setia pada tujuan yang lebih luhur: mewujudkan kehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, secara bermartabat dan beradab. Sebab pada akhirnya, masa depan sebuah bangsa tidak ditentukan oleh apa yang dimilikinya, melainkan oleh cita-cita yang ditujunya, nilai yang dipegangnya, dan pilihan-pilihan tepat yang dengan setia diperjuangkannya secara berkelanjutan.

ALIANSI



KEBANGSAAN

Menghidupkan Nilai Kebangsaan dan Pancasila



INDONESIA BERDAULAT ADIL DAN MAKMUR



WWW.ALIANSIKEBANGSAAN.ORG

Media :

-  aliansi_kebangsaan
-  Jaring Cendekia
-  Forum Kebangsaan
-  Tiga Ranah Pancasila
-  Aliansi Kebangsaan

Narahubung :

Indri Ayu - 0812 9025 4794

Alamat Sekretariat :

Wisma Nugra Santana Lt. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 7-8
Jakarta Pusat 10220

Email : kontak@aliansikebangsaan.org
Website : www.aliansikebangsaan.org